



OPTIMALISASI PATROLI RODA EMPAT SATUAN SABHARA DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR) DI WILAYAH HUKUM POLRES PURBALINGGA

Rio Pranata Tarigan
Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang
Email: rio_tarigan@gmail.com

Abstrak

Fokus Penelitian ini membahas pengoptimalisasian patroli roda empat Satuan Sabhara dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Latar belakang dilakukan penelitian ini karena pelaksanaan kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga belum mampu mencegah tindak pidana Curanmor yang ada di wilayah tersebut. Persoalan dalam penelitian ini meliputi (1).bagaimana pelaksanaan kegiatan patroli roda empat yang dilakukan Satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana Curanmor di wilayah hukum Polres Purbalingga?, (2) apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli roda empat yang dilakukan Satuan Sabhara Polres Purbalingga dalam mencegah tindak pidana Curanmor? (3).bagaimana optimalisasi pelaksanaan kegiatan patroli roda empat yang dilakukan Satuan Sabhara Polres Purbalingga dalam mencegah tindak pidana Curanmor? Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori pencegahan kejahatan, teori manajemen dan analisis SWOT. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan, yang selanjutnya dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Setelah data penelitian diperoleh, langkah yang selanjutnya dilakukan adalah mereduksi data, menyajikan data dan melakukan verifikasi data. Adapun temuan peneliti ini yakni (1).pelaksanaan patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat di Polres Purbalingga tidak sesuai dengan Perkabaharkam No. 4 Tahun 2011 tentang Patroli dan manajemen yang dilaksanakan pimpinan tidak dilaksanakan dengan baik. (2).faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli yaitu faktor internal dan eksternal. (3)optimalisasi patroli roda empat harus dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan dilaksanakan dengan inovasi-inovasi seperti patroli dialogis dan patroli bersinggungan. Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, saran untuk mengoptimalkan kegiatan patroli adalah pelaksanaan patroli harus dilaksanakan sesuai dengan manajemen yang baik, menerapkan patroli dialogis dan patroli bersinggungan.

Key word: Patroli, Curanmor, optimalisasi

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat mengamanatkan bahwa cita-cita Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan hal tersebut maka hal yang terpenting sebagai bentuk aplikasi nyata kepada masyarakat adalah terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Tanpa adanya keamanan dan ketertiban masyarakat, maka pelaksanaan tujuan cita-cita nasional tidak akan tercapai.

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo pada awal pemerintahannya telah mengumandangkan Nawacita sebagai program prioritas. Nawacita berisi sembilan program untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Nawacita pada poin pertama menekankan pada kehadiran negara di tengah-tengah warga negara. Berikut adalah bunyi nawacita poin pertama:

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Negara mengadirkan dirinya melalui Polri di tengah masyarakat untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Polri yang diamanatkan pada Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, juga mempunyai Program yang disebut dengan “Promoter” yaitu Profesional, Modern dan Terpercaya. Promoter berisi program prioritas Kapolri untuk meningkatkan kinerja Polri di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga tercipta kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Program ini sejalan dan mendukung program Nawacita sebagai program prioritas Presiden. Berikut adalah isi dan penjabaran Promoter :

1. Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.
2. Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatasus dan Alpakam yang makin modern.
3. Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Masyarakat sangat mengharapkan Polri dapat mengambil suatu tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Masalah-masalah sosial apabila tidak diatasi dengan baik dapat menghambat terwujudnya pemeliharaan kamanan dan ketertiban masyarakat.

Perkembangan dewasa ini telah banyak menimbulkan perubahan di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pola kehidupan masyarakat yang terus berubah. Pengangguran meningkat dan membuat tingkat kejahatan yang semakin tinggi. Terjadinya kepadatan penduduk dan jumlah pengangguran yang tinggi didukung oleh kemiskinan yang merajalela membuat sejumlah orang melakukan kejahatan untuk dapat bertahan hidup. Salah satu fenomena yang berkembang dengan pesat di masyarakat adalah aksi pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut dengan Curanmor. Curanmor merupakan salah satu penyakit di masyarakat. Dikatakan sebagai penyakit, karena Curanmor adalah salah satu kejahatan yang tumbuh dan terus berkembang di masyarakat.

Tindak pidana pencurian di wilayah Purbalingga bukan merupakan hal yang asing lagi. Tindak pencurian yang telah terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan. Pencurian yang terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga sudah sangat meresahkan masyarakat, karena memberikan dampak yang negatif. Maraknya tindakan pencurian yang terjadi di Kabupaten Purbalingga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan.

Harga-harga barang atau sembako yang semakin meningkat menyebabkan masyarakat membutuhkan dana lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, banyak orang yang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya adalah dengan mencuri. Tingkat perekonomian dan pendidikan yang masih rendah menjadi penyebab munculnya pencurian. Hal ini karena masih banyak pengangguran yang terjadi di masyarakat, sehingga untuk memenuhi biaya hidup pelaku melakukan tindak pidana pencurian. Namun, masyarakat belum mengetahui cara mengatasinya, sehingga tindak pidana pencurian dapat berkembang dengan pesat.

Salah satu tindak pidana pencurian yang paling pesat terjadi di Kabupaten Purbalingga adalah Curanmor. Hal ini dapat dilihat pada tabel jumlah tindak pidana di wilayah hukum Polres Purbalingga sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Tindak Pidana

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Curat	72	91	92
2.	Curas	10	9	8
3.	Curanmor	43	60	70

Sumber : Intel dasar Polres Purbalingga, 2015

Tabel di atas menunjukkan, bahwa curanmor merupakan tindak pidana yang meningkat dari tahun ke tahun di Wilayah Purbalingga. Pada tahun 2014 terdapat 43 kasus curanmor yang dilaporkan. kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 60 kasus, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 70 kasus. Untuk itu perlu adanya upaya dari Polri untuk mengatasi permasalahan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) karena merupakan tanggung jawab Polri.

Polri menjalankan 5 fungsi teknis dalam pelaksanaan tugasnya yang terdiri dari Binmas, Sabhara, Intel, Lalu Lintas dan Reserse. Tiap fungsi teknis mempunyai peran dan fungsi masing dalam pelaksanaan tugas Kepolisian. Kelima fungsi tersebut saling berkoordinasi dalam menangani dan mencegah permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Upaya preemtif oleh kepolisian dilaksanakan oleh fungsi binmas maupun lintas melalui unit dikmas lintas, kemudian untuk preventif diemban oleh fungsi Sabhara. Sedangkan untuk represif diemban oleh fungsi reserse dan kriminal dan juga lalu lintas melalui penegakkan hukum.

Upaya preventif yang dilakukan fungsi Sabhara adalah langkah awal untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Tugas pokok Sabhara adalah meniadakan kesempatan terhadap orang yang berniat melakukan pelanggaran hukum. Secara umum kegiatan fungsi Sabhara sebagaimana tertera dalam Buku Hanjar Akpol Fungsi Teknis Sabhara bahwa kegiatan Sabhara adalah pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali). Patroli Sabhara adalah salah satu cara untuk mengatasi Curanmor. Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan No. 4 Tahun 2011 tentang Patroli menjelaskan bahwa patroli adalah

Salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/ mengawasi/ memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana, yang menuntut/memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.

Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Purbalingga sudah melakukan banyak upaya untuk mengurangi tingginya tindak pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Purbalingga. Tingginya tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Purbalingga menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Purbalingga belum maksimal atau masih memiliki kendala dalam pelaksanaan tugasnya.

Gambaran di atas membuat peneliti tertarik untuk mengkaji pelaksanaan patroli Sabhara dalam mengurangi tingginya angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Purbalingga. Oleh karena itu, judul dalam penelitian ini adalah "Optimalisasi Patroli Roda Empat Satuan Sabhara dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Wilayah Hukum Polres Purbalingga".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan penelitian skripsi ini adalah "Bagaimana mengoptimalkan patroli Satuan Sabhara Polres Purbalingga dalam mengurangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di wilayah Purbalingga?" Selanjutnya dari permasalahan utama tersebut maka ada beberapa permasalahan yang harus diteliti:

- a. Bagaimana pelaksanaan kegiatan patroli roda empat yang dilakukan Satuan Sabhara dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Purbalingga?
- b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan patroli roda empat yang dilakukan Satuan Sabhara dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Purbalingga?
- c. Bagaimana optimalisasi pelaksanaan kegiatan patroli roda empat yang dilakukan Satuan Sabhara dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Purbalingga?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan persoalan-persoalan di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan tentang optimalisasi patroli roda empat Satuan Sabhara Polres Purbalingga dalam mencegah

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Untuk itu tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan patroli roda empat yang dilakukan Satuan Sabhara dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Purbalingga.
- b. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan patroli roda empat yang dilakukan Satuan Sabhara dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Purbalingga.
- c. Mendeskripsikan optimalisasi pelaksanaan kegiatan patroli roda empat yang dilakukan Satuan Sabhara dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Purbalingga.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi keilmuan maupun dari segi teknis praktis, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan patroli Satuan Sabhara dalam mencegah berbagai jenis tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Selain itu diharapkan pula dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian yang lebih mendalam mengenai optimalisasi patroli Satuan Sabhara.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat penelitian ini bagi Polri adalah sebagai bahan masukan untuk mengurangi tingginya angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- b. Manfaat penelitian ini bagi Polres Purbalingga adalah diharapkan menjadi masukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana Curanmor di wilayah hukum Polres Purbalingga.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian digunakan sebagai literatur yang menyajikan informasi penelitian yang dilakukan. Kepustakaan penelitian memuat data-data empirik dari hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan bagi penelitian yang dilakukan saat ini. Suatu penelitian ilmiah memerlukan penelitian lain (terdahulu) sebagai dasar (referensi) untuk mendukung keakuratan dan kebenaran suatu tulisan atau penelitian. Penelitian terdahulu juga sebagai dasar untuk menghindari duplikasi penelitian yang dilakukan saat ini. Kepustakaan penelitian adalah suatu penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh sarjana atau ahli, dalam hal ini berkenaan dengan topik yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Kepustakaan penelitian yang digunakan berupa laporan penelitian dalam bentuk skripsi terdahulu yang menjadi acuan bagi penulis yaitu:

Pertama, penulisan ini mengacu kepada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Richard Bagoes Yoga Saputera Alumni Akpol Angkatan 47 dengan judul “Upaya Unit Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Wilayah Hukum Polres Mojokerto Kota“. Saputera dalam penelitiannya membahas tentang upaya yang dilakukan unit patroli sebagai langkah pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan beromotor di lingkungan masyarakat Mojokerto Kota. Rumusan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah

bagaimana upaya Unit Patroli Satuan Sabhara dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polres Mojokerto Kota .

Persamaan dari hasil penelitian yang dilakukan Saputera dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengangkat judul penelitian tentang kegiatan patroli dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya.

Perbedaan antara kedua skripsi ini adalah obyek penelitian yang dilakukan, dimana mahasiswa Richard Bagoes Yoga Saputera melakukan penelitian di Polres Mojokerto Kota, sedangkan penelitian saat ini melakukan penelitian di Polres Purbalingga. Penggunaan teori juga ada sedikit perbedaan yaitu penelitian sebelumnya menggunakan teori Aktivitas Rutin, teori Pencegahan Kejahatan dan teori Manajemen , sedangkan penelitian ini menggunakan teori Pencegahan Kejahatan, teori Manajemen dan teori SWOT. Dalam penyajian fokus penelitian juga berbeda penelitian terdahulu fokus kepada pelaksanaan patroli yang disertai dengan kegiatan dialog dengan masyarakat yang mengutamakan penyampaian pesan-pesan Kamtibmas, sedangkan penulis fokus kepada pelaksanaan patroli yang telah dilakukan oleh unit patroli satuan sabhara , faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan patroli dan bagaimana cara untuk mengoptimalkan pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh unit patroli satuan sabhara agar dapat mengurangi angka curanmor. Kebaruan dari penelitian yang dilaksanakan adalah menggunakan analisa SWOT sebagai pisau analisis permasalahan.

Kedua, penulis menggunakan hasil penelitian dari TONY PRAWIRA alumnni Akpol Angkatan 46 dengan judul “Optimalisasi Patroli Sabhara Roda Dua dalam Mengurangi Tingginya Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polsek Dau”. Prawira dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana cara untuk mengoptimalkan Unit Patroli Satuan Sabhara dalam mengurangi tingginya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polsek Dau. Prawira membahas tentang upaya yang dilakukan unit patroli sebagai langkah pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan beromotor di lingkungan masyarakat Mojokerto Kota yang belum maksimal. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kurangnya kinerja Unit Sabhara Polsek Dau dalam pelaksanaan patroli untuk mengurangi tingginya curanmor dari segi internal adalah manajemen yang dilaksanakan masih kurang optimal karena belum sesuai dengan Dasar Hukum yang ada, sedangkan dari eksternal adalah kurangnya kesadaran masyarakat (mahasiswa) dalam memenuhi himbuan kepolisian.

Adapun persamaan dari hasil penelitian yang dilakukan Prawira dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengangkat judul penelitian tentang kegiatan patroli dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya.

Perbedaan antara kedua skripsi ini adalah obyek penelitian yang dilakukan, dimana mahasiswa Prawira melakukan penelitian di Polsek Dau ,sedangkan penelitian saat ini melakukan penelitian di Polres Purbalingga. Dalam penggunaan teori juga ada sedikit perbedaan yaitu penelitian sebelumnya menggunakan teori Aktivitas Rutin dan teori Manajemen sedangkan penelitian ini menggunakan teori Pencegahan Kejahatan, teori Manajemen dan teori SWOT. Kebaruan dari penelitian yang dilaksanakan adalah menggunakan analisa SWOT sebagai pisau analisis permasalahan.

Tabel 2.1
Kepustakaan Penelitian Skripsi Terdahulu

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1	“Upaya Unit Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian	Pendekatan Kualitatif, fokus penelitian yaitu patroli, teori Pencegahan	Lokasi penelitian Mojokerto Kota, teori Aktivitas	Analisis SWOT

	Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Wilayah Hukum Polres Mojokerto Kota“ (Richard Bagoes Yoga Saputera, 2016)	Kejahatan dan teori Manajemen	Rutin	
2	“Optimalisasi Patroli Sabhara Roda Dua dalam Mengurangi Tingginya Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polsek Dau” (Tony Prawira, 2015)	Pendekatan Kualitatif, fokus penelitian yaitu patroli, dan menggunakan teori Manajemen	Lokasi penelitian Desa Dau, teori Aktivitas Rutin	Teori Pencegahan Kejahatan dan analisis SWOT

2.2 Kepustakaan Konseptual

Penelitian ini mengutip dan mempelajari teori dan konsepsi yang relevan sehingga dapat digunakan sebagai pisau analisis terhadap temuan-temuan penelitian serta mampu memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti secara ilmiah.

Untuk menjelaskan fenomena dan permasalahan mengenai Optimalisasi Patroli Roda Empat Satuan Sabhara dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Wilayah Hukum Polres Purbalingga, penulis menggunakan teori dan konsep sebagai berikut :

2.2.1 Teori Pencegahan Kejahatan

Pencegahan kejahatan berarti melakukan tindakan sebelum kegiatan kejahatan tersebut terlaksana. Pencegahan dapat diartikan juga sebagai tindakan untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan. Hal ini didukung dengan pendapat Lab dalam PTIK (2006: 31), bahwa “Pencegahan kejahatan secara jelas merupakan sebuah tindakan untuk menghilangkan kejahatan sebelum kejadian atau sebelum kegiatan kejahatan berkembang jauh”.

Polri dalam melaksanakan tugasnya memiliki prinsip yaitu lebih baik mencegah dari pada menindak. Upaya kepolisian dalam melakukan pencegahan salahsatunya melalui kegiatan preventif. Kegiatan preventif adalah segala kegiatan dan usaha untuk memperkecil kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan niat negatifnya atau mencegah kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas. Menurut Kaiser dalam Amilian (2016: 17) bahwa:

“pencegahan kejahatan meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha pemberian pengaruh kepada orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum”

Teori diatas menjelaskan bahwa pencegahan yang dilakukan adalah untuk mencegah faktor bertemunya niat dari calon pelaku kejahatan dan adanya suatu situasi dan kondisi yang tidak memiliki pengawasan. Contohnya adalah di suatu rumah yang ditinggal saat pemilik rumah lagi bekerja, sementara di rumah tidak ada penjaganya dan di depan rumahnya ditinggal sepeda motor. Situasi dan kondisi yang tidak memiliki pengawasan ini yang disebut dengan kesempatan, sehingga muncul niat dari calon pelaku kejahatan untuk

mencuri sepeda motor tersebut. Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan meningkatkan faktor-faktor yang menurunkan motivasi dari calon pelaku untuk melakukan kejahatan, salah satu bentuknya adalah meningkatkan kehadiran polisi di daerah-daerah rawan kejahatan. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis tentang pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Satuan Sabhara dalam pelaksanaan patroli roda empat.

2.2.2 Teori Manajemen

Manajemen merupakan proses yang dilakukan dengan bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Stoner dalam Rokhayati (2014: 13) “manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan”. Hal ini didukung dengan pendapat Schermerhorn dalam Silalahi (2011: 6) bahwa, manajemen diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian terhadap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Menurut pendapat Terry dalam Smith (2009: 4) bahwa:

“manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan:

perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain”.

Pengertian-pengertian di atas dapat menjelaskan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur, melibatkan, dan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu secara efektif dan efisien yang telah ditetapkan.

Manajemen dalam pelaksanaannya memiliki fungsi-fungsi. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Terry dalam Smith (2009: 17), terdapat kombinasi fungsi fundamental yang paling umum dalam rangka pencapaian tujuan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Adapun penjelasan tentang keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan adalah bagaimana pimpinan mempersiapkan segala keperluannya untuk mendukung pelaksanaan tugas. Menurut Terry dalam Smith (2009: 17), “*Planning* (perencanaan) ialah bagaimana manajer menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan yang digariskan”.

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan tahap untuk membagi dukungan anggota dan dukungan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini didukung dengan pendapat Terry dalam Smith (2009: 17) bahwa, “*Organizing* (pengorganisasian) yaitu bagaimana manajer membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut, dan menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi”.

3. *Actuating* (memberi dorongan)

Actuating dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Pelaksanaan yang dilakukan oleh suatu organisasi merujuk pada perencanaan dan pengorganisasian yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Terry dalam Smith (2009: 17), “*Actuating* (memberi dorongan) yaitu kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai”.

4. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan merupakan tugas pimpinan untuk melihat dan mengamati pelaksanaan tugas yang dilaksanakan anggota. Pengawasan ini bertujuan untuk melihat apakah pelaksanaan tugas yang dilaksanakan anggota sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Menurut Terry dalam Smith (2009: 17), “*Controlling* (pengawasan) adalah tugas manajer untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik”.

Fungsi-fungsi yang dijelaskan oleh Terry di atas didukung oleh pendapat Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992: 4) bahwa “fungsi-fungsi manajemen adalah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*)”. Stoner menjelaskan keempat fungsi manajemen itu sebagai berikut:

A. Perencanaan (*planning*)

Menurut Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992: 4) “Perencanaan (*planning*) menunjukkan bahwa para manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya”. Lazimnya tindakan manajer itu didasarkan atas metode, rencana, atau logika tertentu, bukan atas suatu firasat”. Perencanaan merupakan suatu tahapan bagi manajer untuk menentukan pelaksanaan kegiatan dan tujuan organisasi. Rencana yang telah dibuat memberikan sasaran bagi organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai sasaran tersebut (Stoner dalam Bakowatun dan Molan, 1992: 4). Perencanaan dapat membuat organisasi memperoleh serta mengatur sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuannya (Stoner dalam Bakowatun dan Molan, 1992: 4).

B. Pengorganisasian

Menurut Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992: 4) “pengorganisasian (*organization*) berarti para manajer itu mengkoordinir sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi. Pengorganisasian ini dilaksanakan oleh manajer untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan. Organisasi yang semakin terpadu dan terkoordinasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka akan semakin efektiflah organisasi itu (Stoner dalam Bakowatun dan Molan, 1992: 4).

C. Pemimpinan

Menurut Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992: 4) “Pemimpinan memberikan bagaimana para manajer mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya, bagaimana cara agar orang-orang lain melaksanakan tugas-tugas yang esensial. Dengan menciptakan suasana yang tepat, manajer membantu para bawahannya untuk bekerja sebaik-baiknya”. Kepemimpinan seorang manajer akan terlihat dari bagaimana ia mengatur organisasi ke arah tujuan yang telah ditetapkan.

D. Pengendalian

Menurut Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992: 4) “Pengendalian (*controlling*) berarti manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya”.

Pengendalian ini berguna apabila ada pelaksanaan yang salah, manajer dapat menemukan penyebabnya kemudian membelokkannya kembali ke arah yang benar (Stoner dalam Bakowatun dan Molan, 1992: 4). Manajer harus memastikan bahwa tindakan para anggota organisasi benar-benar membawa organisasi ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Inilah fungsi pengendalian dari manajemen.

Teori manajemen yang telah dijelaskan diatas digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk membahas pelaksanaan dan optimalisasi patroli roda empat yang dilaksanakan oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga. Teori ini dapat menjadi tolak ukur mengenai pelaksanaan manajemen yang dilaksanakan dalam pelaksanaan patroli.

2.2.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT dapat menjelaskan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu organisasi. Menurut Rangkuti (2015: 19), “Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*)”. Analisis SWOT mempertimbangkan faktor lingkungan eksternal peluang dan ancaman yang dihadapi serta lingkungan internal kekuatan dan kelemahan. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan sehingga dari analisis tersebut dapat diambil suatu keputusan strategis dari suatu organisasi. Perencana strategis harus menganalisis faktor faktor strategis dalam kondisi yang ada saat ini.

Riset SWOT diperlukan agar organisasi yang kita kelola menjadi semakin baik sesuai dengan misi dan visinya (Rangkuti, 2016: 47). Pada dasarnya, Analisis SWOT merupakan instrumen pengidentifikasian berbagai faktor yang terbentuk secara sistematis yang digunakan untuk merumuskan strategi perusahaan. Pendekatan analisis ini ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunity*) sekaligus dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threat*).

Menurut Rangkuti (2015: 20), Matriks swot dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dankelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis.

Tabel 2.2
Matriks SWOT

Internal Eksternal	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Peluang (<i>Opportunity</i>)	STRATEGI SO Ciptakan Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman (<i>Threats</i>)	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Berikut ini adalah keterangan dari matriks SWOT diatas :

1. Strategi SO (Strength and Oppurtunity). Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar – besarnya.
2. Strategi ST (Strength and Threats). Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
3. Strategi WO (Weakness and Oppurtunity). Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
4. Strategi WT (Weakness and Threats). Strategi ini berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Analisis SWOT akan menunjukkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Satuan Sabhara Polres Purbalingga dalam melaksanakan patroli untuk mencegah Curanmor. Kekuatan yang dimiliki Satuan Sabhara dapat digunakan untuk merebut peluang, mengatasi ancaman dan mengatasi kelemahan yang ada.

2.2.4 Konsep Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang diberi imbuhan *-isasi*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimal artinya “terbaik; tertinggi; paling menguntungkan” (Sugono,2008: 1021). Dalam bahasa Indonesia *-isasi* menunjukkan proses. Optimalisasi dapat disimpulkan merupakan suatu proses atau serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang terbaik, tertinggi ataupun yang paling menguntungkan.

Berdasarkan pengertian di atas penulis memilih konsep optimalisasi. Konsep tersebut digunakan sebagai pisau analisis pelaksanaan kegiatan patroli roda empat yang dilakukan oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga.

2.2.5 Konsep Patroli

Patroli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anggota polisi dengan cara berpindah-pindah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berdasarkan Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 4 tahun 2011 tentang Patroli pasal 1 angka (3) pengertian patroli adalah :

Salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/ mengawasi/memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana, yang menuntut/memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.

Patroli yang dilaksanakan oleh Satuan Sabhara memiliki metode-metode dalam pelaksanaannya. Metode pelaksanaan patroli tersebut diatur pada pasal 4 ayat 1 Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Patroli, menyebutkan bahwa:

- 1) Yang dimaksud metode patroli dalam pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. Patroli dengan jalan kaki

- b. Patroli dengan menggunakan sepeda
- c. Patroli dengan menggunakan kendaraan R2
- d. Patroli dengan menggunakan kendaraan R4
- e. Patroli dengan menggunakan speed boat

Pelaksanaan kegiatan Patroli sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkabaharkam Polri) No. 4 Tahun 2011 Tentang Patroli, pelaksanaan kegiatan patroli dilaksanakan dengan 4 tahap yaitu tahap persiapan, acara arahan pimpinan (AAP), tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran serta dalam setiap kegiatan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian. Berikut dijelaskan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan patroli Patroli yang idealnya harus dilaksanakan oleh Satuan Sabhara :

A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan patroli tersebut diatur pada pasal 6 Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Patroli, menyebutkan bahwa

- (1) Setiap melaksanakan tugas patroli, pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan melakukan kegiatan persiapan.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. menyiapkan surat perintah;
 - b. menyiapkan kekuatan petugas patroli sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. melakukan pengecekan kondisi fisik dan mental personel, kelengkapan perorangan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk patroli;
 - d. menentukan rute berangkat dan rute kembali;
 - e. menentukan titik temu atau titik kumpul dengan petugas patroli lainnya; dan
 - f. menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit-unit patroli.

B. Acara Arahan Pimpinan (AAP)

Acara Arahan Pimpinan (AAP) yang harus diberikan sebelum pelaksanaan patroli tersebut diatur pada pasal 7 Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Patroli, menyebutkan bahwa:

Sebelum pelaksanaan tugas patroli, pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan melaksanakan Acara Arahan Pimpinan (AAP) kepada seluruh anggota Polri yang ditugaskan dalam patroli dengan menyampaikan :

- a. gambaran/karakteristik daerah sasaran, bentuk-bentuk sasaran/objek yang akan dilakukan patroli;
- b. rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh petugas patroli;
- c. batasan waktu pelaksanaan patroli; dan
- d. larangan dan kewajiban petugas patroli.

C. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan secara umum dalam pelaksanaan patroli tersebut diatur pada pasal 9 Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Patroli, menyebutkan bahwa:

Cara bertindak secara umum, bagi setiap petugas yang melaksanakan patroli adalah :

- a. menjelajahi daerah, rute, dan sasaran yang telah ditentukan serta melihat kemungkinan adanya kerawanan;
- b. mendatangi tempat-tempat penyelenggaraan pengamanan swakarsa seperti pos keamanan lingkungan, pos satuan pengamanan, dan pos-pos pengamanan lainnya untuk melakukan tukar-menukar informasi;
- c. mendatangi sentra-sentra kegiatan masyarakat/pemerintah yang bersifat sementara/situasional;
- d. melakukan komunikasi terhadap masyarakat dengan maksud memperoleh informasi-informasi penting bagi tugas kepolisian;
- e. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- f. mewaspadai kemungkinan berubahnya PG, AG menjadi GN;
- g. memberikan peringatan kepada warga masyarakat yang lalai mengamankan diri dan harta bendanya;
- h. memberikan peringatan kepada masyarakat yang karena ketidaktahuannya melakukan pelanggaran;
- i. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- j. melakukan tindakan terhadap pelanggaran Tindak Pidana Ringan;
- k. melakukan tindakan represif terbatas;
- l. mencatat segala informasi yang didapat dari masyarakat maupun yang ditemukan sendiri ke dalam buku catatan (blanko patroli); dan
- m. melaporkan perkembangan situasi selama melakukan kegiatan patroli terutama apabila dipandang perlu meminta bantuan lebih lanjut.

D. Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran yang harus dilaksanakan setelah pelaksanaan patroli tersebut diatur pada pasal 15 Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Patroli, menyebutkan bahwa:

- (1) Konsolidasi dilakukan oleh para petugas pelaksana patroli dalam rangka mengakhiri kegiatan dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan.
- (2) Dalam rangka konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apel konsolidasi dilakukan oleh petugas yang paling tinggi pangkatnya dalam suatu kelompok/unit patroli/pimpinan lapangan.
- (3) Melaporkan kepada pusat pengendali tentang semua yang dilihat, didengar, dan didapat selama patroli serta kondisi petugas.

Pelaksanaan Patroli yang dilaksanakan oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan Perkabaharkam No. 4 Tahun 2011 tentang patroli. Patroli Satuan sabhara diharapkan dapat mencegah bertemunya niat dan kesempatan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.

2.2.6 Konsep Curanmor

Sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP Pasal 362, pencurian adalah barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Sementara itu, pada Pasal 363 KUHP, diatur hal-hal sebagai berikut.

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a) pencuri ternak;
 - b) pencurin pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - c) pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuinya atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 - e) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, diancam dengan penjara paling lama sembilan tahun.

Selanjutnya, dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Angka 7 dan 8, disebutkan bahwa kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor kemudian kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

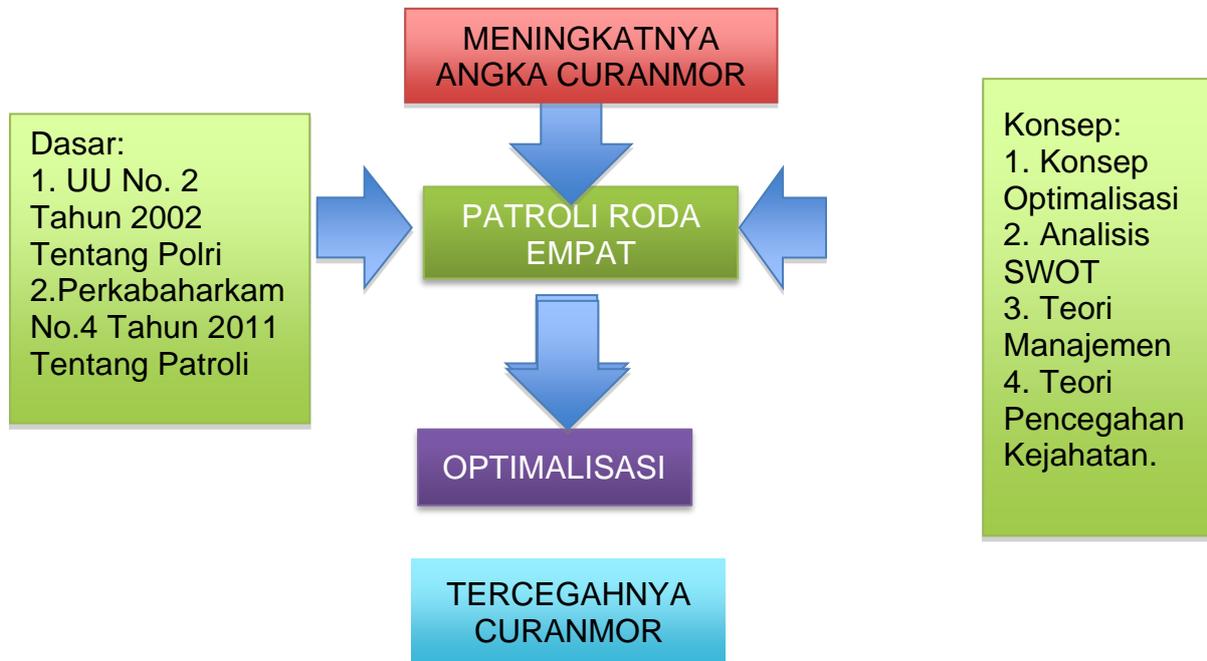
2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah alur pikir yang digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Kerangka berfikir ini juga berisi konsep-konsep yang akan membatasi ruang lingkup penulisan sehingga arah penulisan jelas mengacu kepada permasalahan yang diangkat dalam penulisan. Penulis menggambarkan alur pikir dalam gambar berikut:

Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Purbalingga dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polres Purbalingga dengan melaksanakan patroli. Patroli merupakan salah satu upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Patroli tersebut sudah dilakukan oleh Satuan Sabhara, namun kegiatan patroli yang dilakukan belum efektif dalam menekan angka gangguan kamtibmas. Pelaksanaan patroli tersebut harus dilakukan dengan manajemen yang baik agar dapat mencapai tujuan kegiatan patroli tersebut. Pelaksanaan patroli yang dilaksanakan sesuai dengan Perkabaharkam No. 4 Tahun 2011 tentang Patroli dan teori manajemen dapat mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan patroli dapat menekan angka kejahatan sehingga dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli yang dilakukan masih memiliki kekurangan sehingga perlu dioptimalkan dengan menekan kelemahan dan ancaman yang mempengaruhinya dengan mendayagunakan faktor-faktor pendukung yaitu kekuatan dan peluang yang ada sesuai dengan Teori SWOT. Apabila kegiatan patroli yang dilakukan oleh Unit Patroli Satuan Sabhara sudah dioptimalisasikan maka tercapailah keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Optimalisasi Patroli Roda Empat Satuan Sabhara dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Wilayah Hukum Polres Purbalingga



METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dengan alasan bahwa pemilihan objek penelitian yang diteliti tidak dapat diukur dengan data-data angka. Objek penelitian ini memerlukan pendalaman dan penggalian tentang fenomena-fenomena yang menjadi akar permasalahan dari masalah tersebut. Dalam penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif, memiliki perbedaan proses daripada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggambarkan penelitian secara umum. Sedangkan penelitian kualitatif memberikan khusus terhadap suatu kasus. Menurut Moleong dalam Ibrahim (2015: 53):

Pendekatan kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang berasumsi bahwa *subject matter* suatu ilmu sosial adalah amanat berbeda dengan *subject matter* dari ilmu fisik/alamiah dan mempersyaratkan tujuan yang berbeda untuk *inkuiri* dan seperangkat metode penyelidikan yang berbeda pula. Cara kerjanya bersifat induktif, yang berisi nilai-nilai subjektif, holistik dan berorientasi pada proses. Karena itu menurutnya, pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran yang holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam tentang suatu objek yang diteliti

Menurut Kaelan dalam Ibrahim (2015: 53), “pendekatan kualitatif dalam penelitian dicirikan dengan kesadaran bahwa dunia dengan berbagai persoalan sosial bersifat nyata, dinamis dan bersifat multidimensional, karena tidak mungkin dapat didekati dengan batasan-batasan yang bersifat eksakta (pasti dan matematis)”. Berdasarkan pengertian di atas pendekatan kualitatif adalah bertujuan memahami fenomena sosial yang dijelaskan melalui uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis. Semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut (Bungin dalam Ibrahim, 2015: 52). Pendekatan kualitatif digunakan untuk melakukan penggalian informasi secara mendalam mengenai optimalisasi patroli roda empat Satuan Sabhara Polres Purbalingga dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curamor) di wilayah hukum Polres Purbalingga.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang tepat sangat mempengaruhi dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field study research*). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu peristiwa yang berlangsung secara nyata di lapangan.

Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah, penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara (Moleong, 2010: 26).

Pada penelitian ini, peneliti turun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi patroli roda empat satuan sabhara dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum polres purbalingga.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah objek masalah yang dijadikan pusat perhatian atau orientasi suatu penelitian. Menurut Moleong (2010: 386) “Tidak satupun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Fokus itu pada dasarnya adalah sumber pokok dari masalah penelitian”. Berdasarkan pernyataan di atas yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah optimalisasi patroli Satuan Sabhara dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di Wilayah Hukum Polres Purbalingga. Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan yaitu membatasi studi dan kedua menetapkan kriteria untuk menyaring informasi yang masuk (Moleong, 2010: 386).

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilakukan. Lokasi penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah wilayah Polres Purbalingga.

3.4 Sumber Data

Sumber data merupakan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian. Menurut Kaelan dalam Ibrahim (2015: 67), “sumber data itu adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman dan guru dalam penelitian”. Sedangkan menurut Satori dalam Ibrahim (2015: 67), sumber data bisa berupa benda, orang, maupun nilai, atau pihak yang dipandang mengetahui tentang *social situation* dalam objek material penelitian (sumber informasi).

Sumber informasi yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan secara langsung serta wawancara yang dilakukan secara mendalam terhadap para narasumber yang telah ditentukan. Menurut Moleong (2010: 157), “Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan-serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya”. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari mempelajari buku-buku/literature, referensi, majalah, dokumen, artikel dan tulisan tulisan para penelitian sebelumnya. Meskipun disebut sebagai sumber kedua (tambahan), dokumen tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2010: 159)

Berikut adalah beberapa narasumber yang diwawancarai guna mendapatkan informasi untuk penelitian:

1. Kapolres Purbalingga
Sebagai orang yang bertanggung jawab di wilayah hukum Purbalingga serta langkah langkah dan kebijakan yang telah dibuat mengenai Polres Purbalingga untuk mencegah tindak pidana khususnya curanmor.
2. Kasat Sabhara Polres Purbalingga
Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kasat Sabhara dalam optimalisasi patroli roda empat guna mencegah terjadinya tindak pidana khususnya curanmor.
3. Kanit Turjawali
Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kanit Turjawali dalam optimalisasi patroli roda empat dalam mencegah terjadinya tindak pidana khususnya curanmor
4. Anggota Sat Sabhara Polres Purbalingga
Untuk mendapatkan informasi mengenai optimalisasi patroli roda empat serta mengetahui hambatan hambatan apa yang ditemukan dalam pelaksanaan patroli.
5. Masyarakat
Untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai patroli roda empat yang dilaksanakan oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Menurut Bungin dalam Ibrahim (2015: 81), “observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya, disamping indra lainnya seperti telinga, hidung, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya”.

Observasi dalam penelitian kualitatif dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian (Satori dalam Ibrahim, 2015: 81). Penelitian ini melakukan observasi tentang optimalisasi patroli roda empat Satuan Sabhara Polres Purbalingga dalam mencegah Curanmor di lapangan. Observasi dengan melihat secara langsung ke lapangan dapat mengetahui kegiatan nyata dalam optimalisasi patroli roda empat yang dilakukan oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga. Penelitian ini dapat memperoleh data yang akurat dan pasti dengan ikut serta dalam kegiatan tersebut.

3.5.2 Wawancara Mendalam

Wawancara adalah mengajukan pertanyaan atau tanya jawab antara satu individu dengan individu lain atau satu individu dengan individu yang banyak guna mendapatkan informasi agar tujuan yang diinginkan pemberi pertanyaan dapat tercapai. Menurut

Sugiyono (2015: 137), “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi penulisan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penelitian ini ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil”.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2010: 186). Wawancara digunakan karena merupakan alat yang efektif dalam pengumpulan data guna informasi yang mana isinya berupa tanggapan, pendapat, keyakinan, hasil pemikiran, dan pengetahuan seseorang tentang masalah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam, wawancara tersebut akan dilakukan secara langsung kepada narasumber yang memiliki informasi dan kompetensi terkait masalah penelitian.

3.5.3 Studi Dokumen

Menurut Sugiyono dalam Ibrahim (2015: 94), “dokumen adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang”. Moleong dalam bukunya Metodologi penelitian kualitatif membagi dokumen kepada dua jenis; dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong dalam Ibrahim, 2015: 95).

Menurut Moleong (2010: 217), “Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Maksud dari mengumpulkan dokumen pribadi ialah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor disekitar subjek penelitian”. Dokumen pribadi itu dapat berupa buku harian (diary book), surat pribadi (private letter) dan otobiografi. Dokumen resmi adalah selain dokumen pribadi yang dapat dipilah kepada dokumen internal dan eksternal (Moleong, 2010: 218).

Studi dokumen dilakukan agar penelitian ini memperoleh data dari dokumen dokumen yang ada di Polres Purbalingga, buku buku *literature* perpustakaan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

Dengan menggunakan teknik telaah dokumen ini peneliti akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi dan sifatnya lebih pasti karena sumber dokumen bersifat stabil dan alamiah. Informasi-informasi yang dibutuhkan tidak hanya diperoleh dari sumber manusia saja namun dapat juga diperoleh dari data-data yang memuat informasi tentang optimalisasi patroli roda empat oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga sebagai upaya preventif dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Purbalingga. Dokumen-dokumen yang dapat digunakan oleh penelitian ini antara lain jadwal patroli, rencana kegiatan patroli, laporan hasil pelaksanaan patroli dan lain sebagainya yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian ini.

3.6 Validitas Data

Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Moleong (2013: 330) membedakan teknik ini menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

3.6.1 Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Moleong, 2010: 331). Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang optimalisasi patrol roda empat yang dilakukan oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga dalam mencegah Curanmor di wilayah tersebut, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke anggota Sabhara, ke atasan yang menugasi, dan masyarakat yang merasakan dampak dari

optimalisasi patroli tersebut. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut.

3.6.2 Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data, yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Moleong, 2010: 331). Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain. Atau mungkin semua benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3.6.3 Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pelaksanaan triangulasi waktu dilaksanakan dengan cara pengumpulan data dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, sehingga akan memberikan data yang lebih valid dan lebih kredibel (Moleong, 2010: 332). Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2010: 248), “analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensisteskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*).

Menurut Patton dalam Ibrahim (2015: 105), “analisis data kualitatif adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar, hingga proses penafsiran. Dalam konteks analisis, penafsiran dimaksud yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data model interaktif. Analisis data interaktif terdiri dari kegiatan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusion*) (Miles dan Hubberman dalam Ibrahim, 2015: 108).

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dimana seorang peneliti yang dilaksanakan perlu melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan. Reduksi tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Sebagai salah satu tahapan kerja analisis, kegiatan reduksi tidak boleh asal saja membuang atau mengurangi data. Melainkan harus betul-betul data yang tak berguna yang dipisahkan. Menurut Pawito dalam Ibrahim (2015: 109) “mengingat dua hal yang harus disadari ketika melakukan reduksi data; pertama, reduksi data harus dimulai dari kegiatan melakukan editing, pengelompokan dan meringkas data; kedua, perlunya dibuat pengkodean

data, pencatatan-pencatatan (memo) mengenai berbagai hal, termasuk yang terkait dengan aktivitas serta proses-proses menemukan tema, kelompok dan pola-pola data". Data yang telah dipastikan, dikumpulkan tersusun rapi, sistematis dan sesuai dengan katagori masing-masing, maka dapat dilakukan penyajian data.

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian, diolah agar menjadi suatu informasi hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan dan permasalahan optimalisasi patroli roda empat yang dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana Curanmor oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga. Data diolah dengan cara memperpendek, memperjelas, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, serta membuat fokus data-data mengenai kegiatan kegiatan pengoptimalan patroli yang dilakukan guna mencegah Curanmor oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga yang diperoleh di lapangan, karena tidak semua hal yang didapatkan di lapangan mutlak selalu sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai pelaksanaan kegiatan patroli, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan patroli serta optimalisasi patroli yang dilakukan dalam mencegah Curanmor oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga. Sehingga apa yang nantinya disajikan dapat efektif dan efisien untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Sabhara dalam optimalisasi patrol roda empat Satuan Sabhara dalam mencegah Curanmor di wilayah hukum Polres Purbalingga.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data dapat dimaknai sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data secara jelas data-data yang dihasilkan dalam bentuk gambar, grafik, bagan, tabel dan lain-lain. Kegiatan penyajian data dalam analisis kualitatif meliputi langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lain, sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan yang utuh. Hal ini penting disadari mengingat karakter data kualitatif yang beragam perspektifnya dan terasa tertumpuk (Parwito dalam Ibrahim, 2015: 110).

Data yang akan disajikan dari penelitian mengenai optimalisasi patroli yang dilakukan dalam mencegah Curanmor oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga dapat dimunculkan ke berbagai model, seperti gambar, tabel dan hasil wawancara. Data tersebut kemudian dianalisa untuk mengetahui masing-masing informasi dari data yang telah diperoleh tersebut, dan kemudian dijelaskan dalam bentuk narasi agar pembaca mudah memahami hasil penelitian mengenai kegiatan optimalisasi patroli roda empat yang dilakukan dalam mencegah Curanmor oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga tersebut.

Peneliti menyajikan data ini dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengambilan kesimpulan, menyajikan suatu informasi dengan sistematis, dan juga memudahkan dalam pemahaman secara menyeluruh mengenai kegiatan pengoptimalan patroli yang dilakukan guna mencegah Curanmor oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah analisis penarikan kesimpulan biasanya dilakukan sebagai implementasi prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada, dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat (Parwito dalam Ibrahim, 2015: 110). Pada tahap ini, penelitian yang dilakukan dapat melakukan konfirmasi dalam rangka mempertajam data, memperjelas pemahaman dan penafsiran yang telah dibuat sebelum penelitian sampai pada kesimpulan akhir.

Penarikan simpulan atau verifikasi dalam penelitian ini sebenarnya sudah dilakukan sejak pengumpulan data yaitu pada saat penelitian yang dilakukan melalui wawancara, studi dokumen dan pengamatan mengenai optimalisasi patroli roda empat yang dilakukan dalam mencegah Curanmor oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga.

Verifikasi ini selanjutnya dilakukan dengan cara memberi arti mengenai gambar dan data yang diperoleh pada saat peneliti melakukan penelitian, memaknai hasil wawancara, menjelaskan sebab akibat dari optimalisasi patrol roda empat yang dilakukan dalam mencegah Curanmor oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga. Penarikan simpulan atau verifikasi dilakukan dengan mengambil simpulan-simpulan berdasarkan realita data yang ditemukan dari masing-masing permasalahan dari kegiatan optimalisasi patroli Sabhara dalam mencegah Curanmor di wilayah hukum Polres Purbalingga, yang selanjutnya dapat disajikan dalam bab V (lima) atau kesimpulan.

3.8 Jadwal Penelitian

Proses pengumpulan data dilakukan selama 2 minggu Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Tabel 3.1
Tahap Kegiatan Penelitian

NO	TAHAP KEGIATAN	M1	M2
1	Persiapan	✓	
2	Pembahasan pokok-pokok pertanyaan penelitian (tahap awal pengumpulan data)	✓	✓
3	Pengumpulan data, pengecekan data dan informasi	✓	✓
4	Analisa data	✓	✓
5	Penyusunan laporan	✓	✓

Penjelasan mengenai tabel di atas:

- Pada minggu pertama dilakukan persiapan berupa proses perizinan kemudian tahap awal pengumpulan data yang dilanjutkan dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian selanjutnya analisa data dan penyusunan laporan.
- Pada minggu kedua dilakukan pengumpulan yang masih kurang kemudian dianalisa selanjutnya dilakukan penyusunan laporan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Fokus Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Hukum Polres Purbalingga

Secara umum wilayah hukum Polres Purbalingga yang menjadi objek penelitian penulis terbentang pada posisi $101^{\circ} 01'$ - $109^{\circ} 035'$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 10'$ - $1^{\circ} 29'$ Lintang Selatan, di bagian Barat Daya Ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Wilayah Hukum Polres Purbalingga yang terbagi menjadi 18 Kecamatan membawahi 224 desa dan 15 Kelurahan dengan perincian wilayah sebagai Berikut :

- Luas wilayah Kecamatan Kemangkong: 19 desa dengan luas wilayah 45,13 km² dan jumlah penduduk 66.304 Jiwa
- Luas wilayah Kecamatan Bukateja: 14 Desa dengan luas wilayah : 42,40 km² dan jumlah penduduk 80.419 Jiwa
- Luas wilayah Kecamatan Kejobong: 13 desa dengan luas wilayah : 39,99 km² dan jumlah penduduk 55.861 Jiwa
- Luas wilayah Kecamatan Pengadegan : 9 desa dengan luas wilayah : 41,75 km² dan jumlah penduduk 48.320 jiwa
- Luas wilayah Kecamatan Kaligondang : 18 desa dengan luas wilayah : 50,54 km² dan jumlah penduduk 69.829 jiwa

- f. Luas wilayah Kecamatan Purbalingga: 13 desa dengan luas wilayah : 14,72 km² dan jumlah penduduk 71.042 jiwa
- g. Luas wilayah Kecamatan Kalimanah : 17 desa dengan luas wilayah : 22,51 km² dan jumlah penduduk 64.363 jiwa
- h. Luas wilayah Kecamatan Padamara : 14 desa dengan luas wilayah : 17,27 km² dan jumlah penduduk 53.505 jiwa
- i. Luas wilayah Kecamatan Kutasari : 15 desa dengan luas wilayah : 52,90 km² dan jumlah penduduk 69.521 jiwa
- j. Luas wilayah Kecamatan Bojongsari : 13 desa dengan luas wilayah : 29,25 km² dan jumlah penduduk 70.152 jiwa
- k. Luas wilayah Kecamatan Mrebet : 19 desa dengan luas wilayah : 47,89 km² dan jumlah penduduk 80.496 jiwa
- l. Luas wilayah Kecamatan Bobotsari : 16 desa dengan luas wilayah : 32,28 km² dan jumlah penduduk 60.483 jiwa
- m. Luas wilayah Kecamatan Karangreja : 7 desa dengan luas wilayah : 74,49 km² dan jumlah penduduk 52.653 jiwa
- n. Luas wilayah Kecamatan Karangjambu : 6 desa dengan luas wilayah : 46,09 km² dan jumlah penduduk 35.898 Jiwa
- o. Luas wilayah Kecamatan Karanganyar : 13 desa dengan luas wilayah : 30,55 km² dan jumlah penduduk 46.869 jiwa
- p. Luas wilayah Kecamatan Kertanegara : 11 desa dengan luas wilayah : 38,02 km² dan jumlah penduduk 42.532 jiwa
- q. Luas wilayah Kecamatan Karangmoncol : 13 desa dengan luas wilayah : 60,27 km² dan jumlah penduduk 62.994 jiwa
- r. Luas wilayah Kecamatan Rembang : 12 desa dengan luas wilayah : 91,59 km² dan jumlah penduduk 70.843 jiwa

Jumlah penduduk di Wilayah Hukum Polres Purbalingga 1.013.084 jiwa yang terdiri dari 500.561 laki-laki dan 512.523 perempuan. Jumlah penduduk tersebut dapat dijadikan modal dasar pembangunan nasional, namun juga dapat menimbulkan kerawanan sosial apabila tidak diatur dengan baik. Belum tercapainya keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyedia fasilitas pendidikan, lapangan kerja dan adanya PHK dari perusahaan yang melakukan efisiensi tenaga kerja akan menambah jumlah angka pengangguran.

Tingginya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas dengan modus curat, curas, curanmor, dll. Pelaku kriminalitas dipengaruhi oleh tekanan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga melakukan tindak pidana.

Laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat dan penyebaran penduduk yang tidak merata serta belum seimbang lapangan pekerjaan bagi usia produktif. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah diantaranya ketenagakerjaan, fasilitas pendidikan dan tempat pemukiman sehingga menimbulkan permasalahan sosial.

Penduduk di Wilayah Hukum Polres Purbalingga yang terus bertambah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi potensi terjadinya tindak pidana apabila disalahgunakan.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Purbalingga



Sumber: Intel dasar Res. Purbalingga 2017

Batas wilayah hukum Polres Purbalingga:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Banyumas
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Banyumas dan Kab. Banjarnegara
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Banjarnegara

Jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga terdapat ketidak seimbangan dengan penyediaan lapangan kerja sehingga menimbulkan bertambahnya jumlah pengangguran. Bertambahnya jumlah pengangguran tersebut akan berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas khususnya tindak pidana Curanmor.

Kasus kejahatan konvensional mengalami perkembangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, maka perlu adanya peningkatan pencegahan kejahatan. Salah satu cara untuk meningkatkan pencegahan kejahatan yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan patroli yang dilaksanakan oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga.

4.1.2 Gambaran Umum Polres Purbalingga

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor menjelaskan bahwa Satuan Sabhara Polres Purbalingga bertugas melaksanakan pengaturan pengaturan, penjagaan, pewan, dan patroli (Turjawali), pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama penanganan tindak pidana ringan (Tipiring) dan pengendalian massa (Dalmas) dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

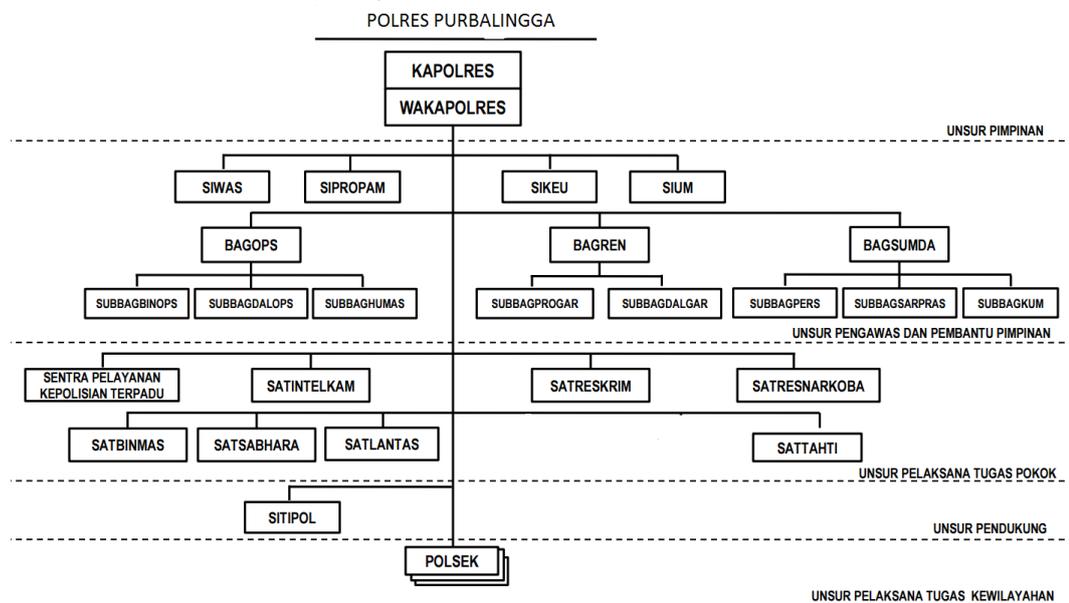
Susunan organisasi Polres Purbalingga berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Pengesahan Nomenklatur dan Titelatur Susunan Organisasi Polri Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, terdiri atas :

1. Unsur Pimpinan terdiri dari: Kapolres dan Wakapolres
2. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri dari Bagian Operasional (Bag Ops), Bagian Perencanaan (Bag Ops), Bagian Sumber Daya (Bag Sumda), Seksi Pengawasa (Siwas), Seksi Provost dan Paminal (SiPropam), Seksi Keuangan (Sikeu) dan Seksi Umum (Sium).
3. Unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari: SPKT, Satuan Intel dan Keamanan (Intelkam), Satuan Reserse Kriminal (Reskrim), Satuan Narkoba, Satuan Binmas, Satuan Sabhara, Satuan Lantas, Satuan Pengamanan Objek Vital (Pamobvit), Satuan Polisi Air dan Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Tahti).
4. Unsur pendukung yaitu Sitipol (Seksi Teknologi dan Informasi Polri).
5. Unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polsek

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 1503 / X / 2001 tanggal 12 Oktober 2001 tentang Buku Petunjuk Administrasi Struktur, Eselonisasi, dan Penggolongan Jabatan dalam kepangkatan di lingkungan organisasi Polri. Kapolres Purbalingga dijabat oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi. Wakapolres Purbalingga dijabat oleh seorang Komisaris Polisi. Eselon Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf masing-masing dijabat oleh seorang Komisaris Polisi. Pejabat di Eselon Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan dijabat oleh seorang Ajun Komisaris Polisi. Pejabat di Eselon Pelaksana Utama dan Kewilayahan berpangkat Ajun Komisaris Polisi.

Setiap unsur di atas memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing terhadap Polres sesuai dengan tugas pokok fungsinya namun, setiap unsur tersebut tetap melakukan koordinasi antar unsur agar dapat saling mendukung dalam pelaksanaan tugas yang di pimpin oleh Kapolres selaku pimpinan di Polres. Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Kapolda. Adapun bagan struktur organisasi Polres Purbalingga adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Polres Purbalingga



Sumber: Bag. Sumda Polres Purbalingga

Polres Purbalingga memiliki jumlah personil sebanyak 826 orang yang terdiri dari 779 anggota Polri dan 47 PNS. Jumlah personil Polres Purbalingga dengan perbandingan standar DSP (Daftar Susunan Personil) menurut Perkap No 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Personel Polres Purbalingga

NO	PIMP/BAG/SAT/SI	POLRI	DSP POLRI	PNS	DSP PNS
1	PIMPINAN	2	2	0	0
2	BAG OPS	17	20	1	3
3	BAG REN	8	10	2	2
4	BAG SUMDA	29	24	4	5

5	SIWAS	6	7	0	2
6	SIPROPAM	14	15	0	0
7	SIKEU	4	5	2	4
8	SIUM	2	7	5	4
9	SPKT	10	13	0	0
10	SAT INTELKAM	30	49	2	2
11	SAT RESKRIM	46	60	2	6
12	SAT RESNARKOBA	13	23	1	2
13	SAT BINMAS	11	19	1	2
14	SAT SABHARA	82	123	1	2
15	SAT LANTAS	85	71	7	2
16	SAT TAHTI	4	8	1	0
17	SITIPOL	5	8	0	0
18	PA/BA/PNS STAF	6	0	0	0
	JUMLAH	374	464	29	36

NO	GOLONGAN	JUMLAH	DSP			
1	PERWIRA	87				
2	BINTARA KESATUAN POLRI	692	DSP POLRI	PNS	DSP PNS	
3	POLRES TAMTAMA PURBALINGGA	0	374	464	29	36
4	POLSEK PNS PURBALINGGA	47	37	48	4	2
3	POLSEK KALIMANAH TOTAL	826	25	48	3	2
4	POLSEK PADAMARA	25	25	48	1	2
5	POLSEK KUTASARI	24	24	48	0	2
6	POLSEK KEMANGKON	23	23	48	1	2
7	POLSEK KALIGONDANG	21	21	48	1	2
8	POLSEK BUKATEJA	31	31	48	2	2
9	POLSEK PENGADEGAN	23	23	48	1	2
10	POLSEK KEJOBONG	20	20	48	1	2
11	POLSEK BOJONGSARI	24	24	48	1	2
12	POLSEK MREBET	24	24	48	1	2
13	POLSEK BOBOTSARI	37	37	48	1	2
14	POLSEK KARANGREJA	22	22	48	1	2
15	POLSEK KARANGANYAR	27	27	48	0	2
16	POLSEK KARANGMONCOL	21	21	48	0	2
17	POLSEK REMBANG	21	21	48	0	2
	JUMLAH	779	779	1278	47	68

Sumber : data Bag. pers polres Purbalingga

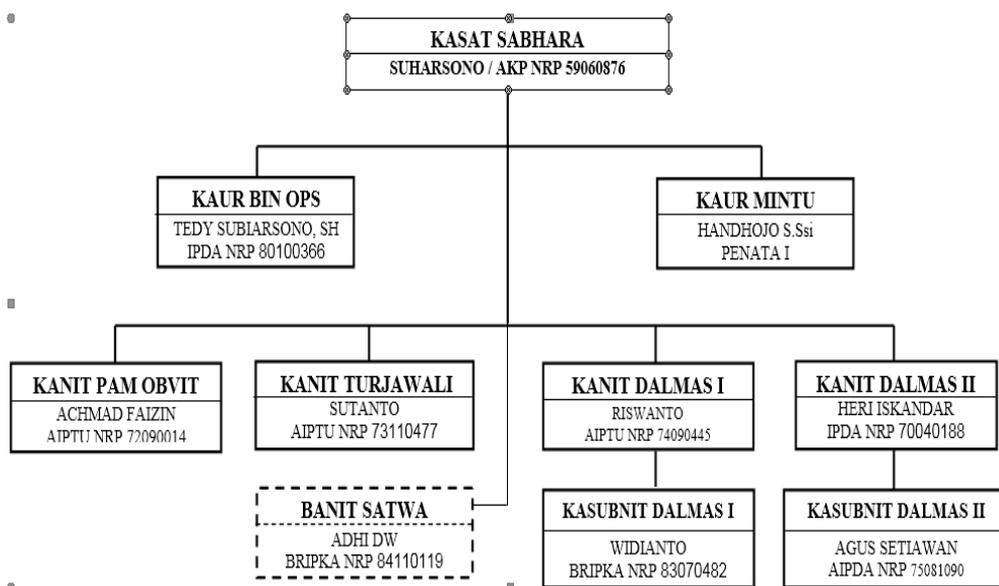
Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah personil Polres Purbalingga belum memenuhi standar DSP (Daftar Susunan Personil). Jumlah personil Polres Purbalingga yang belum memenuhi

standar akan menjadi faktor penghambat bagi Polres Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokoknya.

4.1.3 Satuan Sabhara Polres Purbalingga

Satuan Sabhara merupakan salah satu bagian struktur organisasi Polres Purbalingga. Adapun struktur organisasi Satuan Sabhara Polres Purbalingga dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Satuan Sabhara Polres Purbalingga



Sumber : Sat Sabhara Polres Purbalingga

Struktur organisasi Satuan Sabhara di atas dapat kita lihat bahwa Kesatuan Fungsi Sabhara terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pelaksana. Kasat Sabhara Polres Purbalingga dipimpin oleh AKP Suharsono.

Berdasarkan sumber data jumlah personel dari bagian Administrasi Polres Purbalingga, bahwa jumlah personel satuan Sabhara Polres Purbalingga masih belum memenuhi jumlah DSPP yakni 125 kekuatan personel. Akan tetapi, data riil kekuatan personel yang dimiliki Satuan Sabhara Polres Purbalingga hanya berjumlah 79 personel, dengan demikian masih dibutuhkan lagi sebanyak 46 personel. Kurangnya personel tersebut menjadi kendala bagi Satuan Sabhara dalam pelaksanaan tugasnya. Berikut daftar riil dan DSP personel Satuan Sabhara Polres Purbalingga:

Tabel 4.2
Daftar Rill dan DSP Personil Satuan Sabhara

Sumber : Sat Sabhara Polres Purbalingga

Kemampuan anggota Satuan Sabhara Polres Purbalingga dalam hal penugasan tentang kemampuan fungsi teknis kepolisian di bidang Sabhara juga dinilai masih kurang.

NO	URAIAN	RIIL	DSP	KET
		JML	JML	
1.	KASAT SABHARA	1	1	-
2.	KAUR BIN OPSNAL	1	1	-
3.	KAUR MINTU	1	1	Dijabat PNS IIID
4.	BAMIN	3	4	Kurang BA = 1
5.	BANUM	0	2	Kurang PNS = 2
6.	KANIT TURJAWALI	1	1	Dijabat BA
7.	BANIT TURJAWALI	20	40	Kurang BA = 20
8.	KANIT PAM OBVIT	1	1	Dijabat BA
9.	BANIT PAM OBVIT	13	10	Lebih BA = 3
10.	KANIT DALMAS	2	2	Dijabat BA
11.	KASUBNIT DALMAS	2	2	Dijabat BA
12.	BANIT DALMAS	34	60	Kurang BA = 26
	JUMLAH	79	125	Kurang = 46
	SATWA	3	-	-

Hal ini ditunjukkan dengan data anggota Satuan Sabhara yang telah mengikuti pendidikan kejuruan dan pelatihan

sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Anggota Sabhara Yang Telah Mengikuti Dikjur dan Pelatihan

N O	JENIS DIKJUR F.SABHARA	NAMA	PANGKAT	NRP
1.	TURJAWALI	ALFIAN NOOR ANGGA PUTRA, S.Psi	BRIGADIR	87070675
2.	PAM OBVIT	TEDY SUBIYARSONO,SH	IPDA	80100366
3.	SATWA / K9	AGUNG NURGROHO	BRIGADIR	83060457

Sumber : Sat Sabhara Polres Purbalingga

Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Purbalingga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan patroli diantaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4
Daftar Inventaris Satuan Sabhara Polres Purbalingga

NO	NAMA BARANG	Satuan	JUMLAH RIIL
----	-------------	--------	-------------

			Rusak Ringan	Rusak Berat	JUMLAH
1	2	7	4	5	6
1	R6 / TRUK DALMAS	Unit	-	-	2
2	R6 / TRUK BOX	Unit	-	-	1
3	R4 / SEDAN LANCER	Unit	-	-	2
4	R4 / FORD RANGER	Unit	-	-	1
5	R4 / SATWA	Unit	-	-	1
6	R2 / TRAIL RAIMAS	Unit	-	-	15
7	TAMENG	Buah	-	-	128
8	MASKER GAS	Buah	-	19	39
9	TAS MASKER	Buah	-	-	25
10	FILTER MASKER	Buah	-	-	10
11	HANDYCAM	Unit	-	-	1
12	CAMERA DIGITAL	Unit	-	1	1
13	HELM DALMAS	Buah	-	20	146
14	TONGKAT T	Buah	-	-	-
15	TONGKAT PANJANG	Buah	-	-	44
16	PEMADAM API	Unit	-	3	3
17	PELINDUNG BADAN	Unit	-	-	19
18	PELINDUNG KAKI	Set	-	-	30
19	PELINDUNG TANGAN	Set	-	-	15
20	FLASHBALL	Unit	-	-	4
21	CATHRIDGE FLASH BALL	Buah	-	-	100
22	V2 SABHARA	Pucuk	-	-	18
23	ROGER MINI	Pucuk	-	-	7
24	SKS	Pucuk	-	-	15
25	HANDY TALKY (HT)	Set	-	-	7
26	MEGAPHONE	Unit	-	1	3
27	TENDA DALMAS	Set	1	1	3
28	ROMPI DALMAS	Set	-	-	40
29	CANISTAR	Buah	-	-	20
30	TACTICAL ANTI RIOT GEAR	Set	-	-	48
31	ROMPI MODEL 05 LEVEL III	Buah	-	-	13
32	ROMPI PATROLI POLISI	Buah	-	-	-
33	HELM ANTI PELURU LEVEL III A	Buah	-	-	3
34	ROAD BLOCKER SET SABHARA	Unit	-	-	10

35	Borgol	Unit	-	-	-
----	--------	------	---	---	---

Sumber : Sat Sabhara Polres Purbalingga

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk mendukung kegiatan patroli Satuan Sabhara ada 2 perlengkapan yang tidak dimiliki Satuan Sabhara. Perlengkapan itu adalah tongkat T dan Borgol .

Patroli rutin yang dilaksanakan oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga adalah dengan menggunakan metode patroli roda empat (R4). Kendaraan yang sering digunakan sebagai sarana patroli adalah kendaraan roda empat (R4) merk Sedan Lancer yang berjumlah dua buah, namun pada pelaksanaannya hanya digunakan satu buah.

Satuan Sabhara memiliki tugas pokok, fungsi dan peran. Berdasarkan Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 4 tahun 2011 tentang Patroli pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 dijelaskan tugas pokok, fungsi dan peran Satuan Sabhara yaitu:

(1) Patroli bertujuan untuk mencegah kejahatan ditengah masyarakat untuk mengurungkan bertemunya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan dengan menuntut kehadiran anggota Polisi , yang memungkinkan timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman serta rasa tentram kepada masyarakat, menjalin hubungan sebagai mitra masyarakat untuk mendapatkan informasi dan partisipasi masyarakat serta pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat.

(2) Patroli berfungsi untuk melaksanakan pencegahan dan penindakan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan dalam hal tertangkap tangan, memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancaman kejahatan.

(3) Patroli berperan sebagai tulang punggung (*backbone*) Polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/gangguan Kamtibmas, sebagai sumber informasi, mata dan telinga bagi kesatuan, sebagai perwujudan kehadiran Polri di tengah masyarakat dan mitra masyarakat, sebagai sarana penyampaian pesan Kamtibmas terhadap masyarakat, sebagai cerminan kesiapsiagaan Polri setiap saat dan setiap waktu dalam upaya pemeliharaan dan menjamin Kamtibmas, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, sebagai petugas pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam dan kecelakaan.

4.1.3 Gambaran Umum Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polres Purbalingga
Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian Administrasi Reskrim bahwa jumlah kasus Curanmor yang terjadi di wilayah Polres Purbalingga dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat dilihat dari data perbandingan kriminalitas tahun 2014-2016 di wilayah hukum Polres Purbalingga di bawah ini:

Tabel 4.5
Data Perbandingan Kriminalitas Tahun 2014 – 2016 di Wilayah Hukum Polres
Purbalingga

NO	JENIS KEJAHATAN	TAHUN					
		2014		2015		2016	
		L	S	L	S	L	S
1	CURAT	72	36	91	53	92	46
2	CURAS	10	5	9	8	8	7
3	CURANMOR	43	12	60	14	70	46
4	ANIRAT	1	1	3	3	3	3
5	KBK/ PBKR	37	33	32	33	20	20
6	PEMBUNUHAN	3	3	-	-	1	1
7	UANG PALSU	-	-	-	-	-	-
8	NARKOTIKA	-	-	-	-	-	-
9	PERKOSAAN	1	1	3	3	-	-
10	KENAKALAN REMAJA	-	-	-	-	-	-
11	PENCURIAN BIASA	35	22	9	7	17	13
12	PENIPUAN	38	29	31	27	33	30
13	PENGGELAPAN	17	17	8	7	14	14
14	JUDI	17	17	16	16	15	15

Sumber: Sat Reskrim Polres Purbalingga

Tabel di atas menunjukkan, bahwa curanmor merupakan tindak pidana yang meningkat dari tahun ke tahun di Wilayah Purbalingga. Pada tahun 2014 terdapat 43 kasus curanmor yang dilaporkan. kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 60 kasus, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 70 kasus. Untuk itu perlu adanya upaya dari Polri untuk mengatasi permasalahan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) karena merupakan tanggung jawab Polri.

Sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP Pasal 362, pencurian adalah barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Sementara itu, pada Pasal 363 KUHP, diatur hal-hal sebagai berikut.

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - f) pencuri ternak;
 - g) pencurin pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - h) pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuinya atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - i) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 - j) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- 2 Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, diancam dengan penjara paling lama sembilan tahun.

Kejadian Curanmor ini juga tak jarang terjadi karena kesalahan dari pemilik kendaraan sendiri seperti tidak memasang kunci ganda pada kendaraan, meninggalkan motor/mobil dengan kunci masih menggantung dimotor/mobil, meninggalkan motor/mobil dihalaman pada saat memanaskan mesin dan lain-lain.

Dalam hal Curanmor ini, peran Unit Patroli hanya bertindak mencegah terjadinya kejahatan dan melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan atau mengemban fungsi preventif, sebagaimana dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Kanit Turjawali Aiptu Sutanto di penjaan Satuan Sabhara, "karena Satuan Sabhara ini mengemban tugas preventif jadi ketika Unit Patroli bergerak maka secara otomatis Curanmor tidak ada. tetapi ketika Patroli tidak bergerak/bergerak meninggalkan suatu tempat maka kemungkinan Curanmor pasti ada, intinya antara pelaku dan petugas patroli seperti kucing-kucingan" (wawancara, 8 Maret 2017).

4.2 Pelaksanaan Kegiatan Patroli Roda Empat yang Dilaksanakan Satuan Sabhara dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Purbalingga

Pelaksanaan kegiatan Patroli sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkabaharkam Polri) No. 4 Tahun 2011 Tentang Patroli, pelaksanaan kegiatan patroli dilaksanakan dengan 4 tahap yaitu tahap persiapan, acara arahan pimpinan (AAP), tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran serta dalam setiap kegiatan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian. Tahapan pelaksanaan patroli tersebut dianalisis dengan menggunakan teori manajemen Untuk menilai pelaksanaan Patroli roda empat yang dilakukan oleh Unit Patroli dapat dilihat dari fungsi manajemen yang dilakukan oleh Kanit Turjawali. Teori manajemen Stoner digunakan untuk menganalisis manajemen yang dilakukan oleh Kanit Turjawali. Berikut dijelaskan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan patroli yang dilaksanakan Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Purbalingga:

1. Tahap Persiapan

Tahap Persiapan merupakan tahapan perencanaan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mempersiapkan hal-hal yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan patroli. Hal ini didukung oleh pendapat Terry Dalam Smith (2009: 17) bahwa " *Planning* (perencanaan) ialah bagaimana manajer menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan yang digariskan". Rencana yang telah dibuat memberikan sasaran bagi organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai sasaran tersebut (Stoner dalam Bakowatun dan Molan, 1992: 4). Perencanaan dapat membuat organisasi memperoleh serta mengatur sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuannya (Stoner dalam Bakowatun dan Molan, 1992: 4).

Pelaksanaan patroli yang dilaksanakan oleh unit patroli mengacu kepada Jadwal yang telah ditentukan. Jadwal tersebut sudah dibuat oleh Kanit Turjawali. Kegiatan Patroli Unit Patroli dilakukan dari jam 08.00 wib - 20.00 wib oleh regu A, setelah regu A selesai melaksanakan tugas, kemudian dilanjutkan oleh regu B dari jam 20.00 wib-08.00 wib sementara regu C bertindak sebagai cadangan jadi menunggu untuk mengganti regu B. Di bawah ini adalah jadwal pelaksanaan Patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat satuan sabhara Polres Purbalingga pada bulan Maret 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Jadwal Pelaksanaan Patroli Bulan Maret

Kelompok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	31					
REGU A	S	M	LD									
REGU B	M	LD	S									
REGU C	LD	S	M									

Sumber : Satuan Sabhara Polres Purbalingga

Keterangan:

S : Dinas Siang

M : Dinas Malam

LD : Lepas Dinas

Penyiapan surat perintah tugas pelaksanaan patroli R4 dibuat berdasarkan jadwal patroli yang sudah ditentukan. Sprin tersebut selalu dibawa anggota dalam pelaksanaan patroli. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kanit Turjawali “Dalam setiap pelaksanaan patroli selalu dibekali dengan surat perintah dan disesuaikan dengan rengiat, baik harian, mingguan dan bulanan” (wawancara, 8 Maret 2017). Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil studi dokumentasi terhadap surat perintah pelaksanaan patroli R4, yaitu Surat Perintah Nomor: Sprin/49/III/2017 tentang pelaksanaan patroli R2 dengan rute I yang ditanda tangani Kasat Sabhara atas nama Kapolres Purbalingga pada tanggal 2 Maret 2017. Berikut bentuk sprin patroli yang dimaksud:

Gambar 4.4
Surat Perintah Pelaksanaan Patroli R4

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURBALINGGA



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin 49 / III / 2017

Perimbangan : bahwa dalam rangka kepentingan tugas Kepolisian, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang – undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polres Purbalingga TA. 2017 Nomor : SIP DIPA-060.01.2.643372/2017 tanggal 07 Desember 2016;
3. surat perintah Kapolres Purbalingga Nomor : Sprin / 114 / I / 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang pelaksanaan tugas Tunjail rutin di wilayah hukum Polres Purbalingga.

I
DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. AJPTU BUTANTO, 73110477;
SRT Srt Sabhara Polres Purbalingga;
2. AJPIA DARNO, 60110376;
SRT Srt Sabhara Polres Purbalingga;
3. BRIPDA FAUZI FIRMAN, 52120730;
SRT Srt Sabhara Polres Purbalingga;
4. BRIPKA KUMAT MUJONO, 75110474;
SRT Srt Sabhara Polres Purbalingga;
5. BRIPDA AGUS SAFRIO, 55030781;
SRT Srt Sabhara Polres Purbalingga;

Untuk : 1. disamping tugas pokoknya sehari – hari agar melaksanakan tugas Tunjail rutin di wilayah hukum Polres Purbalingga dengan ketentuan:
• melaksanakan tugas patroli R4 dengan route I : Polres – Jl. Leman Yusuf – Perumahan Ganaruh – Perumahan Sirengga – Jl. Dri. Sunarno – Jl. Dri. Pandatan Caji, Witasaba – Jl. Jend. Soedirman – Jln. Kluw. Purbalingga – Jl. Komandan Wassanudin – Jalan Lingkar GOR. Gunung Daktara – J. J. Yani – Jl. Majjend. Sungkara – Polres;
2. kegiatan patroli dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 pukul 06.00 WIB s.d 16.00 WIB;
3. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
4. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapolres Purbalingga;
5. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Purbalingga
pada tanggal : 01 Maret 2017
a.n. KEPOLISIAN RESOR PURBALINGGA
KASAT SABHARA

BUHARSONG
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 55030781

Tembusan :
Kapolres Purbalingga

Sumber: Sat Sabhara Res Purbalingga

Penyiapan surat perintah berguna sebagai dasar anggota untuk melaksanakan patroli. Sprin patroli berisi dasar pelaksanaan patroli, anggota yang bertugas melaksanakan patroli, waktu patroli, rute patroli, dan berisi perintah untuk mengadakan koordinasi dengan unsur terkait. Surat perintah ini wajib dibawa anggota saat melaksanakan patroli. Hal ini sesuai dengan Perkabaharkam Polri No. 4 Tahun 2011 Tentang Patroli pasal 6 ayat (2) huruf a yang berbunyi:

Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. menyiapkan surat perintah

Setelah menyiapkan sprin patroli, Kanit Turjawali melakukan penyiapan kekuatan. Penyiapan kekuatan berguna untuk mendukung pelaksanaan kegiatan patroli sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Perkabaharkam Polri No. 4 Tahun 2011 Tentang Patroli pasal 6 ayat (2) huruf b yang berbunyi:

Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

b. menyiapkan kekuatan petugas patroli sesuai dengan sasaran yang ditetapkan

Penyiapan kekuatan ini sangat penting, tanpa kekuatan yang cukup pelaksanaan patroli akan terhambat dan bahkan tidak dapat dilaksanakan. Jumlah personel yang dimiliki Unit Patroli Polres Purbalingga adalah 9 orang yang di bagi ke dalam 3 regu, jadi masing-masing regu terdiri dari 3 personel Patroli. Personil yang terbatas mengakibatkan ,patroli rutin yang dilaksanakan hanya dengan menggunakan metode patroli roda empat (R4). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kanit Turjawali yang mengatakan bahwa “Karena kurang personil, patroli rutin yang dilakukan hanya dengan metode patroli roda empat. Patroli dengan metode yang lain dilaksanakan pada operasi tertentu saja, dengan batuan dari anggota Satuan Sabhara yang lain” (wawancara, 8 Maret 2017).

Pelaksanaan patroli roda empat menggunakan mobil merk Sedan Lancer yang berjumlah dua buah, namun pada pelaksanaannya hanya digunakan satu buah. Hal ini terjadi karena terjadi kekurangan personel pada Unit Patroli. Pelaksanaan Patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat ini dilaksanakan setiap hari, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasat Sabhara bahwa:

Untuk pelaksanaan Patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat, ada 2 unit kendaraan Patroli dengan merk Sedan Lancer yang di gelar setiap hari. Namun hanya 1 unit kendaraan saja yang digunakan . Satu unit kendaraan Patroli dilaksanakan oleh 3 orang sesuai dengan unit patroli yang telah disusun. Namun di dalam sprin, patroli dilaksanakan oleh 5 orang untuk menyerap anggaran patroli. Hal ini didasarkan oleh Rencana Pendistribusian Anggaran T.A. 2017 Satuan Sabhara. Karena kekurangan personil untuk penyerapan anggaran, maka digunakan 2 orang anggota Sabhara dalam unit lain untuk dicantumkan dalam sprin. 2 orang anggota tersebut telah ditentukan oleh Satuan Sabhara dengan anggota-anggota tersebut tidak dilibatkan dalam kegiatan lain agar tidak terjadi duplikasi anggaran (wawancara, 6 Maret 2017).

Kekurangan personil mengakibatkan hanya 1 unit kendaraan saja yang digunakan. Satu unit kendaraan yang lain tidak digunakan karena kekurangan personil, akibatnya pelaksanaan patroli tidak dapat berjalan dengan efektif. Perlu dilakukan penambahan personel untuk dapat memenuhi kebutuhan personil yang diinginkan. Perencanaan dapat membuat organisasi memperoleh serta mengatur sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuannya (Stoner dalam Bakowatun dan Molan, 1992: 4).

Pimpinan sebelum melaksanakan patroli harus melakukan pengecekan kondisi fisik dan mental personel, kelengkapan perorangan, kelengkapan satuan, sarana dan prasarana yang digunakan. Pengecekan perorangan dan Sarana Prasarana jarang dilakukan secara

langsung oleh Kanit Turjawali. Kanit Turjawali hanya melakukan pengecekan melalui aplikasi Whatsapp. Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Kasat Sabhara bahwa:

Pengecekan perorangan dan sarana prasarana terhadap anggota belum optimal dilaksanakan oleh Kanit Turjawali, bahkan ada perlengkapan patroli yang tidak dimiliki oleh satuan Sabhara. Pengecekan kondisi fisik personil secara langsung juga tidak dilaksanakan, karena Kanit juga sering tidak memberikan AAP secara langsung terhadap anggota. AAP hanya dilakukan melalui group Whatsapp (wawancara, 6 Maret 2017).

Pengecekan perorangan dan sarana prasarana perlu dilakukan secara langsung oleh Kanit Turjawali kepada anggota. Pengecekan tersebut berfungsi untuk mengetahui apakah kondisi fisik dan mental personel baik, kelengkapan perorangan yang dibawa, kelengkapan satuan, sarana dan prasarana yang digunakan untuk patroli sudah dibawa atau tidak. Hal ini didukung dengan Perkabaharkam Polri No. 4 Tahun 2011 Tentang Patroli pasal 6 ayat (2) huruf c yang berbunyi:

Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- c. Melakukan pengecekan kondisi fisik dan mental personel, kelengkapan perorangan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk patroli

Satuan Sabhara Polres Purbalingga menerapkan metode patroli dengan menggunakan roda empat untuk pelaksanaan patroli rutinnnya. Pelaksanaan patroli anggota harus menyiapkan dan membawa perlengkapan satuan maupun perlengkapan perorangan.

Perlengkapan satuan Satuan Sabhara Purbalingga sudah sepenuhnya dipenuhi, namun perlengkapan perorangan belum sepenuhnya dibawa. Tidak sepenuhnya anggota membawa perlengkapan perorangan yang telah ditetapkan oleh Perkababinkam Polri Nomor II Tahun 2009. Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Kanit Turjawali bahwa:

Pada saat patroli anggota masih belum membawa perlengkapan perorangan seperti borgol dan Tongkat T . Hal tersebut dikarenakan peralatan tersebut tidak dimiliki lagi oleh Satuan Sabhara. Peralatan tersebut sebelumnya ada, namun sekarang peralatan tersebut sudah rusak dan hilang (wawancara, 8 Maret 2017).

Borgol dan Tongkat T itu perlu dibawa oleh anggota yang melaksanakan patroli. Borgol dapat digunakan oleh anggota apabila menemukan pelaku tindak pidana pada saat melaksanakan patroli. Tongkat T dapat digunakan untuk pengamanan petugas dan melakukan perlawanan apabila mendapat ancaman dari pelaku tindak pidana. Peran Kanit selaku pimpinan untuk mengajukan pengadaan borgol dan tongkat T, agar dapat mendukung pelaksanaan patroli. Hal ini didukung oleh lampiran Perkababinkam Polri Nomor II Tahun 2009 yaitu;

Konfigurasi Peralatan Patroli menggunakan Kendaraan Mobil:

a. Perlengkapan Satuan

1. Kendaraan Mobil dengan kapasitas penumpang 2 s/d 5 orang (sesuai dengan spesifikasi teknis)
2. Public Address Sirine
3. Warning Light
4. Alat Komunikasi
5. Sabhara Kit (sesuai spesifikasi teknis)
6. Geographic Position System (GPS)
7. Chain Saw

b. Perlengkapan perorangan

1. Pakaian PDL Sus Sabhara

Polres – Jl. A. Yani – Jl. Suprpto – Jl. A.W. Sumarmo – Jl. Tentara Pelajar – Jl. Veteran – Jl. Pandjaitan – Jl. Jambukarang – Alun-alun Purbalingga – Jl. Jend. Soedirman – Jl. Kapten. Sarengat – Jl. Cahyana – Jl. Sukarno Hatta – Polres.

Keterangan Rute IV :

Polres – Jl. A. Yani – Jl. Suprpto – Jl. Mayjend. DI Pandjaitan – Jl. Pujowiyoto – Jl. Jend. Sudirman – Pertigaan Kodim – Jl. Letkol. Isdiman – Jl. Kapten Sarengat – Jl. Jend. Sudirman – Alun-alun Purbalingga – Pertigaan Sundus – Jl. Komisaris Notosumarsono - Lingkar GOR Guntur Darjono – Jl. A. Yani – Polres.

Rute patroli ditentukan oleh Kanit Turjawali yang dirancang berdasarkan daerah-daerah rawan yang terjadi Tindak Pidana. Daerah-daerah tersebut seperti alun-alun, taman kota, perusahaan-perusahaan, perkantoran, tempat perbelanjaan dan pemukiman masyarakat. Saat melalui rute patroli tersebut anggota Sabhara, melakukan kegiatan sambang dan ceramah kepada masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang terjadi dilingkungannya. Satuan Sabhara juga melakukan inovasi dengan membuat rekaman yang berisi himbauan-himbauan kepada masyarakat, kemudian diputarkan melalui pengeras suara yang ada pada mobil patroli.

Anggota Satuan Sabhara sebelum melaksanakan patroli melakukan koordinasi dengan anggota polsek yang melakukan patroli untuk menentukan titik kumpul. Hal ini didukung dengan Perkabaharkam Polri No. 4 Tahun 2011 Tentang Patroli pasal 6 ayat (2) huruf e yang berbunyi:

Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

e. Menentukan titik temu atau titik kumpul dengan petugas patroli lainnya

Penyiapan titik temu sudah dilakukan oleh anggota Unit Patroli. Kegiatan yang dilakukan tersebut adalah patroli bersinggungan. Pelaksanaan patroli bersinggungan tersebut dikoordinasikan melalui HT dengan anggota Polsek yang menjadi rute patroli sebagaimana disampaikan oleh Kanit Turjawali bahwa “Patroli bersinggungan ini kami laksanakan untuk membangun kerjasama terhadap polsek-polsek yang menjadi rute kami. Patroli ini dikoordinasikan agar terkesan Polisi selalu ada untuk masyarakat” (wawancara, 8 Maret 2017).

Pelaksanaan patroli R4 Satuan Sabhara memerlukan penyiapan alat komunikasi. Unit Patroli sebelum melaksanakan patroli menyiapkan alat komunikasi untuk melakukan koordinasi satu sama lain. Hal ini didukung dengan Perkabaharkam Polri No. 4 Tahun 2011 Tentang Patroli pasal 6 ayat (2) huruf f yang berbunyi:

Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

f. Menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit-unit patroli

Bentuk komunikasi yang digunakan secara umum dengan menggunakan HT (*Handy Talky*). HT digunakan sebagai bentuk perintah, pengawasan, dan kontrol pimpinan terhadap anggota. Selain HT bentuk komunikasi antar anggota patroli adalah media sosial. Media sosial yang digunakan adalah aplikasi grup Whatsapp. Pimpinan juga sering memberikan perintah dengan menggunakan sosial media tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Kanit Turjawali:

Untuk mengefektifkan pelaksanaan patroli saya menggunakan aplikasi grup Whatsapp untuk memberikan AAP, perintah dan pengawasan serta pengendalian terhadap anggota. Aplikasi ini kami gunakan untuk pelaporan internal Sabhara saja, tetapi untuk pelaporan ke stasiun pusat menggunakan HT (wawancara, 8 Maret 2017).

Penyiapan alat komunikasi ini merupakan sarana bagi pemimpin untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan patroli. Menurut Terry dalam Smith (2009: 17), “*Controlling* (pengawasan) adalah tugas manajer untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik”.

Penyiapan alat komunikasi juga dibutuhkan oleh pimpinan untuk melakukan koordinasi terhadap bawahan. Koordinasi dilakukan untuk memastikan apakah pelaksanaan patroli sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Koordinasi tersebut merupakan salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan. Hal ini didukung oleh pendapat Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992: 4) “Pengendalian (*controlling*) berarti manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya”. Pengendalian ini berguna apabila ada pelaksanaan yang salah, manajer dapat menemukan penyebabnya kemudian membelokkannya kembali ke arah yang benar (Stoner dalam Bakowatun dan Molan, 1992: 4).

2. Acara Arahan Pimpinan (AAP)

Acara Arahan Pimpinan (AAP) adalah merupakan sarana pimpinan dalam memberikan arahan berkaitan dengan kegiatan patroli yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan AAP patroli tidak diberikan secara langsung oleh Kanit Turjawali Satuan Sabhara Polres Purbalingga melainkan dengan menggunakan media sosial aplikasi grup Whatsapp, sebagaimana yang dikatakan oleh Kanit turjawali:

Untuk pemberian AAP patroli yang dilaksanakan secara rutin, saya jarang memberikan AAP secara langsung kepada anggota. saya jarang memberikan apel kepada anggota sebelum pelaksanaan patroli. Arahan-arahan mengenai pelaksanaan patroli saya berikan hanya melalui aplikasi grup Whatsapp. Namun untuk patroli yang dilaksanakan pada operasi tertentu, AAP saya berikan secara langsung dan saya apalkan anggota (wawancara, 8 Maret 2017).

Anggota patroli sebelum melaksanakan tugas seharusnya diberikan AAP oleh Kanit Turjawali secara langsung melalui kegiatan apel. Hal ini didukung dengan Perkebarkam Polri No. 4 Tahun 2011 Tentang Patroli pasal 7 yang berbunyi:

Sebelum pelaksanaan tugas patroli, pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan melaksanakan acara arahan pimpinan (AAP) kepada seluruh anggota Polri yang ditugaskan dalam patroli.

Perintah yang diberikan oleh Kanit Turjawali kepada anggota diberikan melalui acara arahan pimpinan. Perintah yang diberikan berguna untuk mengarahkan anggota agar dapat melaksanakan patroli dengan baik. Perintah ini merupakan bagian dari kepemimpinan yang dilakukan oleh Kanit Turjawali. Menurut Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992: 4) “Pemimpinan memberikan bagaimana para manajer mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya, bagaimana cara agar orang-orang lain melaksanakan tugas-tugas yang esensial. Dengan menciptakan suasana yang tepat, manajer membantu para bawahannya untuk bekerja sebaik-baiknya”.

Arahan yang diberikan Kanit Turjawali melalui Aplikasi Whatsapp meliputi nama-nama anggota yang bertugas melaksanakan patroli, sasaran patroli, dan agar melaporkan kejadian-kejadian menonjol yang ditemukan pada saat melaksanakan patroli. Sebagaimana disampaikan oleh Bripka Kuwat Mujiono, salah seorang anggota Unit Patroli “Sebelum pelaksanaan patroli, Kanit memberikan arahan melalui aplikasi Whatsapp. Arahan pimpinan meliputi nama-nama anggota yang melaksanakan patroli, sasaran patroli, dan kepada

anggota yang melaksanakan patroli agar melaporkan kejadian-kejadian menonjol yang ditemukan pada saat bertugas” (wawancara, 6 Maret 2017). Hal ini tidak sesuai dengan Perkabarkam Polri No. 4 Tahun 2011 Tentang Patroli pasal 7 ayat a, b, c, dan d yang berbunyi:

Sebelum pelaksanaan tugas patroli, pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan melaksanakan Acara Arahan Pimpinan (AAP) kepada seluruh anggota Polri yang ditugaskan dalam patroli yang ditugaskan dalam patroli dengan menyampaikan :

- a. gambaran/karakteristik daerah sasaran, bentuk-bentuk sasaran/objek yang akan dilakukan patroli;
 - b. rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh petugas patroli;
 - c. batasan waktu pelaksanaan patroli; dan
 - d. larangan dan kewajiban petugas patroli.
- a. Objek Sasaran

Kanit Turjawali seharusnya memberikan AAP sesuai dengan juknis yang telah dijelaskan di atas. AAP berguna untuk mengorganisasikan anggota untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Menurut Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992: 4) “pengorganisasian (*organization*) berarti para manajer itu mengkoordinir sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi. Pengorganisasian ini dilaksanakan oleh manajer untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan. Organisasi yang semakin terpadu dan terkoordinasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka akan semakin efektiflah organisasi itu (Stoner dalam Bakowatun dan Molan, 1992: 4).

3. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan patroli yang dilakukan oleh Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Purbalingga berpedoman pada juklak/juknisnya. Juklak/juknis pelaksanaan patroli yaitu Peraturan Kabarkam Polri No. 4 Tahun 2011 tentang Patroli serta Peraturan Dirsabhara Baharkam Polri No. 1 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Kegiatan Turjawali Sabhara. Juklak/juknis tersebut sudah diketahui oleh Kasat Sabhara dan anggotanya sebagai pedoman pelaksanaan patroli. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Kapolres Purbalingga AKBP Agus Setyawan Heru Purnomo, S.H.,S.IK, sebagai berikut:

Saya kira Kasat Sabhara sebagai pengawas dan pengendali pelaksanaan patroli sudah mengetahui juklaknya dan bisa menjabarkan juklak/ juknis pelaksanaan patroli tersebut. Tugas dari Kasat Sabhara untuk dapat mengatur anggotanya agar dapat melaksanakan patroli sesuai dengan aturan yang ada (wawancara, 12 Maret 2017).

Pelaksanaannya dilapangan masih dijumpai anggota yang tidak menjalankan juklak/juknis tersebut. Anggota pada saat melaksanakan patroli roda empat tidak melihat, mengamati, mendengar, dan melakukan observasi terhadap segala sesuatu yang berada di sekelilingnya. Berdasarkan dari hasil pengamatan terhadap jalannya patroli yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2017 bahwa “Petugas yang melaksanakan patroli hanya melihat ke arah depan jalan saja tidak melihat sekelilingnya, petugas tidak menggunakan sabuk pengaman, dan kaca mobil tertutup rapat” (wawancara tanggal 7 Maret 2017). Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang disampaikan Akmal salah satu masyarakat Purbalingga “Anggota sabhara yang melaksanakan patroli, terlihat hanya jalan sesuai dengan rutanya saja. Pada saat patroli tidak melihat lingkungan sekelilingnya. Kaca mobil pun ditutup rapat” (wawancara tanggal 7 Maret 2017). Anggota yang melaksanakan patroli seharusnya melakukan pengamatan terhadap segala sesuatu yang berada disekelilingnya. Kaca mobil tidak boleh ditutup rapat, agar apabila ada masyarakat yang membutuhkan

pertolongan dapat terdengar. Hal ini didukung dengan Perkabaharkam Polri No 4 Tahun 2011 tentang Patroli pasal 13 ayat 1 yaitu:

Sikap petugas dalam melaksanakan patroli menggunakan kendaraan R4 adalah :

- a. mengendarai dengan sikap berwibawa, ramah, sopan, tanggap dan peduli; dan
- b. pandangan mata bebas dan menggunakan panca inderanya untuk melihat, mengamati, mendengar, dan melakukan observasi terhadap segala sesuatu yang berada di sekelilingnya.

Anggota Satuan Sabhara Polres Purbalingga yang melaksanakan patroli, mengendarai kendaraan mobil dengan kecepatan sedang/terlalu cepat dan tidak melampaui kecepatan kendaraan lainnya untuk melakukan pengamatan. Hal ini didukung dengan Perkabaharkam Polri No 4 Tahun 2011 tentang Patroli pasal 13 ayat 1 yaitu:

Berjalan mengendarai kendaraan mobil dengan kecepatan sedang/tidak terlaulucepat dan tidak melampaui kendaraan lainnya untuk dapat melakukan pengamatan.

Kecepatan tersebut tidak selamanya stabil disesuaikan dengan sasaran yang dituju. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kanit Turjawali yang mengatakan bahwa:

Kecepatan Kendaraan yang kami gunakan pada saat patroli disesuaikan dengan sasaran patroli. Sasaran tersebut yaitu orang atau masyarakat yang meminta bantuan, Pelaku kejahatan yang terlihat (tertangkap tangan) ingin dikejar, dan panggilan lain yang memerlukan kehadiran polisi (wawancara, 8 Maret 2017).

Pelaksanaan patroli R4 yang dilaksanakan anggota Sabhara harus dilaksanakan sesuai dengan rute yang telah tercantum di dalam surat perintah. Rute-rute yang sudah dibuat adalah berdasarkan kerawanan dan strong point yang telah ditetapkan pimpinan. Pelaksanaan patroli R4 diperlukan kewaspadaan dari anggota terhadap ancaman dan tempat-tempat rawan yang ada. Kewaspadaan tersebut dilakukan dengan mengamati dan memperhatikan tempat-tempat rawan tersebut, serta siap siaga apabila ada ancaman yang datang. Anggota Unit Patroli harus memiliki beberapa kemampuan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh masyarakat. Kemampuan tersebut sesuai pada pasal 16 Peraturan Kabaharkam Polri No. 4 Tahun 2011 tentang Patroli yang berbunyi :

Persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas patroli adalah :

- a. Kemampuan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP);
- b. Kemampuan pengaturan lalu lintas;
- c. Kemampuan pengaturan pengamanan kegiatan masyarakat;
- d. Kemampuan membuat laporan tertulis (verbal);
- e. Kemampuan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket);
- f. Kemampuan memproses Tipiring;
- g. Kemampuan melakukan tindakan represif tahap awal;
- h. Kemampuan penguasaan hukum dan perundang-undangan berkaitan dengan tugas patroli; dan
- i. Menguasai wilayah tugasnya.

Tidak semua anggota memiliki kemampuan tersebut. Kemampuan yang dimiliki oleh anggota hanya didapat pada saat menjalani pendidikan pembentukan Polri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Briпка Kuwat Mujiono, Salah seorang anggota Unit Patroli:

Masih ada sebagian petugas Patroli yang belum mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan tugas Patroli. Hal ini dikarenakan sebagian petugas Patroli hanya mendapatkan ilmu turjawali sewaktu pendidikan pembentukan. Hampir semua

anggota belum melaksanakan Pelatihan atau Pendidikan Kejuruan (Dikjur) mengenai Patroli (wawancara, 6 Maret 2017).

Hal tersebut didukung dengan tabel 4.4 yang sudah dijelaskan sebelumnya yang menunjukkan bahwa hanya 1 orang personel yang telah mengikuti Pendidikan Kejuruan. Personel Polri seharusnya mendapatkan pendidikan kejuruan untuk memenuhi persyaratan kemampuan anggota patroli. Menurut Terry dalam Smith (2009:163) untuk mendapatkan pengetahuan dan teknik-teknik manajemen, maka bisa dilakukan dengan:

- a) Kuliah, instruksi instruksi terprogram, kursus-kursus studi, dan bahan bacaan.
- b) Kursus universitas, konferensi, dan seminar-seminar.
- c) Permainan bisnis (*business games*), menjalankan peranan (*role playing*), dan latihan masuk keranjang (*in basket*).

Pendidikan tentunya sangat penting karena berhubungan dengan kualitas kinerja di lapangan. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan Kapolres Polres Purbalingga yang menyatakan bahwa

Latar belakang pendidikan anggota juga berpengaruh, anggota yang telah dikjur dan diisi kemampuannya biasanya dia lebih yakin dalam mengambil keputusan di lapangan, tanpa harus diperintah dia sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi Sabhara yang sedang terjadi (wawancara, 12 Maret 2017).

Pada saat melaksanakan Patroli R4, anggota Unit Patroli Satuan Sabhara juga melakukan komunikasi dengan Masyarakat. Berdasarkan dari hasil pengamatan terhadap jalannya patroli yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2017 bahwa “Petugas yang melaksanakan patroli mendatangi pos satpam, pos kamling dan masyarakat setempat untuk memberikan pesan-pesan kamtibmas dan menanyakan informasi-informasi penting terutama di daerah rawan”. Hal ini sesuai dengan Perkabaharkam Polri No 4 Tahun 2011 tentang Patroli pasal 13 ayat 1 yaitu:

Berhenti di tempat tertentu dan melakukan komunikasi apabila bertemu orang/masyarakat untuk mendapatkan informasi penting, terutama di daerah rawan.

Anggota tersebut melakukan dialog terhadap masyarakat yang dinamakan patroli dialogis. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang disampaikan Akmal salah satu masyarakat Purbalingga “Anggota Sabhara yang melaksanakan patroli sering mendatangi masyarakat dan melakukan komunikasi.” Hal ini sesuai dengan Perkabaharkam Polri No 4 Tahun 2011 tentang Patroli pasal 1 ayat 4 yaitu

Patroli Dialogis adalah kegiatan Patroli yang dilakukan oleh anggota Polri didalam kegiatannya melakukan kegiatan dialog antara petugas dengan komunitas masyarakat sebagai sasaran Patroli dengan materi dialog yang berupa pesan kamtibmas .

Patroli dialogis perlu dikedepankan untuk membuat kerja sama yang baik antara Polri dan masyarakat. Komunikasi atau dialog yang dilakukan membuat kerja sama yang baik anantara keduanya untuk memelihara kamtibmas

Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satuan Sabhara merupakan salah satu upaya untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan dari pelaku tindak pidana untuk melakukan pelanggaran hukum. Unit Patroli sudah menentukan titik-titik rawan tempat terjadinya tindak pidana. Unit Patroli juga dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya berpatok pada suatu tindak pidana saja. Sebagaimana disampaikan oleh Kanit Turjawali bahwa:

Patroli yang kami laksanakan tidak hanya berpatok kepada satu tindak pidana saja, tetapi pelaksanaan patroli dilaksanakan untuk mencegah terjadinya semua tindak pidana. Beda halnya jika ada momentum atau suatu operasi yang harus dijalankan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana yang telah ditentukan dalam operasi tersebut (wawancara, 8 Maret 2017).

Unit Patroli Satuan Sabhara diharapkan mampu untuk membuat para pelaku tidak memiliki niat dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana curanmor. Hal ini juga didukung dengan teori yang dikemukakan Lab dalam PTIK (2006: 31), "menyatakan bahwa "Pencegahan kejahatan secara jelas merupakan sebuah tindakan untuk menghilangkan kejahatan sebelum kejadian atau sebelum kegiatan kejahatan berkembang jauh".

Teori ini juga lebih mengutamakan pada upaya preventif, dengan mengurangi niat dan kesempatan dari pelaku sebelum melakukan tindak pidana dengan melaksanakan patroli. Adanya patroli diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana yang sering terjadi di Wilayah Purbalingga salah satunya ialah tindak pidana curanmor dan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 terdapat 43 kasus curanmor yang dilaporkan. kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 60 kasus, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 70 kasus. Untuk itu perlu dilakukan patroli roda empat Satuan Sabhara secara rutin dan optimal untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan pelaku tindak pidana untuk melakukannya. Dengan upaya pencegahan diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Sebagaimana dikemukakan Kaiser (Amiliang, 2016: 17 dan Dermawan, 1994:12) dalam teori pencegahan kejahatan yang berarti:

pencegahan kejahatan meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha pemberian pengaruh kepada orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Berkaitan dengan hal tersebut Polres Purbalingga melakukan upaya pencegahan kejahatan patroli khususnya patroli roda empat secara rutin. Patroli tersebut bertujuan menghindari bertemunya niat dan kesempatan dari pelaku tindak pidana sehingga tidak terjadi tindak kejahatan. Pada saat patroli anggota dapat memberikan himbauan-himbauan dan pesan moral kepada masyarakat, sehingga polisi terlihat hadir di tengah masyarakat.

4. Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran dapat disebut juga dengan tahap konsolidasi. Konsolidasi yang menjadi tahap akhir proses patroli tidak disampaikan secara langsung kepada anggota Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Purbalingga. Pelaksanaan anev atau konsolidasi hanya dilakukan melalui Whatsapp. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Kanit Turjawali "Pelaksanaan anev ataupun konsolidasi setiap harinya saya berikan melalui aplikasi grup Whatsapp kepada anggota. Anev yang saya berikan mengenai hal-hal yang menonjol saja" (wawancara, 8 Maret 2017).

Kanit turjawali sebagai Pimpinan seharusnya melakukan konsolidasi dengan melaksanakan apel dengan anggota. Konsolidasi itu berupa pengecekan kekuatan personel, dan apa yang diperoleh anggota pada saat melaksanakan patroli. Hal ini sesuai dengan Perkabaharkam No. 4 Tahun 2011 tentang Patroli pasal 13 ayat 1 yaitu:

- (1) Konsolidasi dilakukan oleh para petugas pelaksana patroli dalam rangka mengakhiri kegiatan dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan.

- (2) Dalam rangka konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apel konsolidasi dilakukan oleh petugas yang paling tinggi pangkatnya dalam suatu kelompok/unit patroli/pimpinan lapangan.
- (3) Melaporkan kepada pusat pengendali tentang semua yang dilihat, didengar, dan didapat selama patroli serta kondisi petugas.

4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Patroli Roda Empat Satuan Sabhara Polres Purbalingga

Bagian ini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli Unit Patroli Satuan Sabhara Purbalingga dengan menggunakan analisis SWOT. Menurut Rangkuti dalam Analisis SWOT (2016: 197), Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*). Analisis SWOT mempertimbangkan faktor lingkungan eksternal peluang dan ancaman yang dihadapi dunia bisnis serta lingkungan internal kekuatan dan kelemahan. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan sehingga dari analisis tersebut dapat diambil suatu keputusan strategis dari suatu organisasi.

Patroli yang dilaksanakan Satuan Sabhara Polres Purbalingga masih memiliki beberapa kendala yang dapat menghambat pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan Patroli yang kurang terhambat membuat kejahatan di wilayah Polres Purbalingga masih terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli roda empat yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

4.3.1 Faktor internal

A. *Strength* (Kekuatan)

Kekuatan yang dimiliki oleh Polres Purbalingga khususnya Satuan Sabhara yang melaksanakan patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat terdiri dari:

- a. Tersedianya pedoman kerja dan Juklak/Juknis, penggunaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dan Pedoman / Petunjuk Pelaksanaan Teknis yaitu Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Patroli dan Peraturan Dirsabhara Baharkam Polri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Kegiatan Turjawali Sabhara.

- b. Adanya HTCK yang baik antara Fungsi Satuan Sabhara dengan Fungsi yang lain di Polres Purbalingga. Satuan Sabhara tidak dapat bekerja sendiri, maka untuk mengatasi keterbatasan tersebut Satuan Sabhara dapat dibantu oleh satuan fungsi yang lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kanit Turjawal "Kita sering juga melibatkan fungsi lain untuk melaksanakan patroli bersama-sama, terutama dalam operasi-operasi tertentu. Operasi tersebut misalnya pada saat malam minggu, hari-hari libur maupun hari-hari besar yang memiliki potensi kejahatan yang besar. Pelaksanaan patroli dengan melibatkan fungsi lain dapat mengaktifkan pelaksanaan patroli. Fungsi-fungsi tersebut menambah jumlah personil dalam pelaksanaan patroli, sehingga semua rute dapat diawasi.

- c. Dukungan Anggaran Pelaksanaan Patroli

Pelaksanaan patroli roda empat yang dilakukan secara rutin oleh Satuan Sabhara didukung dengan anggaran Sabhara. Satuan Sabhara memberikan anggaran sebesar Rp 38.000,- untuk 1 orang petugas dalam sekali melaksanakan patroli. Anggaran yang diterima oleh petugas patroli adalah uang saku anggota sebesar Rp.18.000, uang makan sebesar Rp 16.000, dana satuan sebesar Rp.4.000. Uang saku dan uang makan yang diberikan kepada

anggota dapat digunakan anggota untuk menunjang pelaksanaan patroli yang dilaksanakan. Uang satuan yang diberikan di simpan untuk biaya satuan. Biaya satuan yang dimaksud adalah untuk membeli perlengkapan Patroli yang sudah rusak dan keperluan Satuan Sabhara lainnya.

Anggaran yang diberikan kepada anggota Satuan Sabhara sudah mendukung anggota dalam pelaksanaan patroli. Sebagaimana disampaikan oleh Bripka Kuwat Mujiono, salah seorang anggota Unit Patroli “anggaran yang diberikan kepada anggota Satuan Sabhara sudah mendukung anggota dalam pelaksanaan tugasnya. Anggota sudah dibekali uang saku dan uang makan untuk satu orang anggota setiap satu kali pelaksanaan patroli” (wawancara, 6 Maret 2017). Anggaran patroli juga berbasis kinerja sehingga apabila mengadakan suatu kegiatan dapat didukung oleh anggaran. Sebagaimana disampaikan oleh Bripka Kuwat Mujiono, salah seorang anggota Unit Patroli “Anggaran patroli ini berbasis kinerja sehingga kegiatan dapat didukung anggaran dengan baik” (wawancara, 6 Maret 2017).

B. *Weakness* (Kelemahan)

Kelemahan-kelemahan Dalam pelaksanaan Patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat masih ditemukan adanya kelemahan-kelemahan diantaranya adalah :

a. Kekurangan Personel

Masalah kekurangan personel sudah sejak lama dirasakan oleh Polres Purbalingga khususnya Unit Patroli roda empat Satuan Sabhara. Terjadinya kekurangan personel ini disebabkan oleh pembagian jumlah Sumber Daya Manusia di tubuh Polri yang kurang merata karena untuk beberapa tahun terakhir ini pihak Polres Purbalingga tidak mendapatkan tambahan personel bintanga baru dari Polda. Meskipun ada mutasi personel yang masuk menjadi personel Polres Purbalingga namun diimbangi juga dengan mutasi personel keluar Polres. Hal ini menyebabkan meskipun ada personel yang masuk menjadi anggota Polres namun sebenarnya tidak terjadi penambahan personel.

Jumlah personel yang dimiliki Satuan Sabhara hanya 79 orang personel. Personel yang ada dalam Satuan Sabhara jelas kurang karena idealnya untuk Satuan Sabhara ditingkat Polres berjumlah sekitar 125 orang namun kenyataannya di lapangan hanya berjumlah 79 orang. Personel yang kurang mengakibatkan ada jalur patroli yang tidak dapat ditempuh. Anggota Unit Patroli itu sendiri berjumlah 9 orang yang terdiri dari 3 Unit Patroli. Pelaksanaan Patroli rutin Satuan Sabhara dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan roda empat. Ada 2 unit kendaraan Patroli dengan merk Sedan Lancer yang digelar setiap hari. Namun hanya 1 unit kendaraan saja yang digunakan karena kurangnya personel patroli. Pelaksanaan patroli dengan roda dua juga tidak dilaksanakan pada saat patroli rutin, namun patroli roda dua hanya digunakan pada saat operasi tertentu.

Sprin patroli menyebutkan bahwa pelaksanaan patroli dilaksanakan oleh 5 orang personel. Sprin ini digunakan untuk menyerap anggaran patroli berdasarkan Rencana Pendistribusian Anggaran T.A. 2017 Satuan Sabhara. Kekurangan personel untuk penyerapan anggaran, maka digunakan 2 orang anggota Sabhara dalam unit lain untuk dicantumkan dalam sprin. Dua orang anggota tersebut telah ditentukan oleh Satuan Sabhara dengan anggota-anggota tersebut tidak dilibatkan dalam kegiatan lain agar tidak terjadi duplikasi anggaran. Pelaksanaan patroli roda empat menggunakan mobil merk Sedan Lancer yang berjumlah dua buah, namun pada pelaksanaannya hanya digunakan satu buah. Hal ini terjadi karena terjadi kekurangan personel pada Unit Patroli. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasat Sabhara bahwa:

Untuk pelaksanaan Patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat, ada 2 unit kendaraan Patroli dengan merk Sedan Lancer yang di gelar setiap hari. Namun

hanya 1 unit kendaraan saja yang digunakan . Satu unit kendaraan Patroli dilaksanakan oleh 3 orang sesuai dengan unit patroli yang telah disusun. Namun di dalam sprin, patroli dilaksanakan oleh 5 orang untuk menyerap anggaran patroli. Hal ini didasarkan oleh Rencana Pendistribusian Anggaran T.A. 2017 Satuan Sabhara. Karena kekurangan personil untuk penyerapan anggaran, maka digunakan 2 orang anggota Sabhara dalam unit lain untuk dicantumkan dalam sprin. 2 orang anggota tersebut telah ditentukan oleh Satuan Sabhara dengan anggota-anggota tersebut tidak dilibatkan dalam kegiatan lain agar tidak terjadi duplikasi anggaran (wawancara, 6 Maret 2017).

b. Kemampuan dan Kesadaran Anggota

Tidak semua anggota memahami tugasnya sebagai petugas patroli. Kemampuan yang dimiliki anggota juga belum seperti yang diharapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Briпка Kuwat Mujiono, Salah seorang anggota Unit Patroli:

Masih ada sebagian petugas Patroli yang belum mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan tugas Patroli. Hal ini dikarenakan sebagian petugas Patroli hanya mendapatkan ilmu turjawali sewaktu pendidikan pembentukan. Hampir semua anggota belum melaksanakan Pelatihan atau Pendidikan Kejuruan (Dikjur) mengenai Patroli (wawancara, 6 Maret 2017).

Pendidikan kejuruan tentang Turjawali perlu diberikan bagi anggota Unit Patroli, agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam pelaksanaan patroli. Jumlah keseluruhan anggota satuan Sabhara polres Purbalingga yang pernah mengikuti pendidikan kejuruan Sabhara hanya berjumlah 1 orang.

Kesadaran anggota dalam melaksanakan patroli dinilai masih kurang. Hal ini sesuai dengan penyampaian Kanit Turjawali bahwa “Anggota masih belum sepenuh hati melaksanakan tugasnya, pimpinan mengawasi baru dilaksanakan patroli. Kesadaran anggota melaksanakan patroli tidak ada, bahkan pelaksanaan patroli itu terkadang tidak dilaksanakan dengan berbagai alasan” (wawancara, 8 Maret 2017).

Berdasarkan dari hasil pengamatan terhadap laporan hasil pelaksanaan patroli yang dibuat oleh anggota Unit Patroli, bahwa laporan hasil pelaksanaan masih belum menjelaskan jalannya pelaksanaan patroli. Hal ini juga didukung dengan penyampaian Kanit Turjawali bahwa “ laporan hasil pelaksanaan yang dibuat oleh anggota masih belum bunyi” (wawancara, 8 Maret 2017). Tugas dari Kanit Turjawali harus sering memberikan pengarahan dan penjelasan kepada anggota mengenai bagaimana laporan hasil pelaksanaan yang harus dibuat oleh anggota.

c. Dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas patroli dengan menggunakan kendaraan bermotor. BBM yang diberikan kepada Satuan Sabhara Polres Purbalingga dinilai masih kurang. Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota unit patroli Satuan Sabhara Polres Purbalingga yaitu Briпка Kuwat Mujiono “jadi untuk setiap melaksanakan Patroli, satu unit kendaraan patroli diisi dengan 5 liter bensin namun masih dirasakan kurang mengingat rute yang dilalui cukup jauh karena untuk setiap satu unit kendaraan patroli memback up 2 atau 3 Polsek” (wawancara, 6 Maret 2017).

Permasalahan BBM ini memang cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan Patroli. Setiap melaksanakan patroli untuk setiap unit kendaraan yang di isi hanya 5liter bensin namun hal itu masih di rasakan kurang. Rute yang di lalui anggota patroli jauh. Satu unit kendaraan patroli membackup 2 sampai 3 polsek atau membawahi 2 sampai 3 kecamatan.

4.3.2 Faktor eksternal

A. *Opportunity* (Peluang)

Satuan Sabhara Polres Purbalingga memiliki peluang untuk meningkatkan Patroli khususnya Patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat. Peluang tersebut adalah :

a. Dukungan Masyarakat

Faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan patroli sebagai upaya preventif dalam memelihara kamtibmas yang dilaksanakan oleh Unit Patroli Satuan Sabhara salah satunya adalah dukungan masyarakat. Dukungan tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal apabila hanya mengandalkan Unit Patroli saja. Masyarakat diharapkan dapat turut serta dalam upaya preventif dalam memelihara Kamtibmas dengan mencegah timbulnya pelanggaran dan kejahatan. Pemberdayaan dukungan masyarakat dilakukan melalui pengamanan (pam) Swakarsa dan Siskamling. Pengamanan (pam) Swakarsa dan Siskamling diharapkan akan membantu tugas kepolisian khususnya Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Purbalingga dalam upaya preventif.

Anggota Satuan Sabhara dalam pelaksanaan patroli mendatangi pam Swakarsa dan Siskamling guna mendapatkan informasi mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat setempat. Mendatangi pam Swakarsa dan Siskamling merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan patroli roda empat. Rangkaian pelaksanaan patroli tersebut didukung dengan Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 4 tahun 2011 tentang Patroli pasal 7 dan 8 yaitu:

- (7) Berhenti di tempat tertentu dan melakukan komunikasi apabila bertemu orang/masyarakat untuk mendapatkan informasi penting, terutama di daerah rawan.
- (8) Mengenali segala hal-ihwal terhadap wilayah/daerah/sasaran yang dilakukan patroli yaitu :
 - a. semua objek benda yang bergerak maupun tidak bergerak dengan segala sesuatu yang melingkupinya;
 - b. kondisi infrastruktur jalan dengan seluk-beluknya;
 - c. kondisi wilayah yang meliputi kondisi geografi, iklim, tempat-tempat berbahaya; dan
 - d. karakteristik penduduk/masyarakat setempat.

Pelaksanaan patroli dengan mendatangi pam Swakarsa dan Siskamling sangat mendukung pelaksanaan patroli roda empat. Petugas dapat melakukan komunikasi untuk mendapatkan informasi penting terutama di daerah-daerah rawan. Informasi tersebut adalah mengenai semua objek yang bergerak maupun tidak bergerak, kondisi infrastruktur jalan, dan karakteristik masyarakat setempat. Informasi yang telah didapat dapat menjadi pedoman bagi Satuan Sabhara dalam pelaksanaan patroli untuk mencegah terjadinya tindak pidana kepada masyarakat. Pelaksanaan mendatangi pam Swakarsa dan Siskamling sudah dilaksanakan oleh anggota Sabhara yang melaksanakan patroli. Pelaksanaan tersebut didukung dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bripta Kuwat Mujiono, Salah seorang anggota Unit Patroli menyatakan bahwa:

Pada saat pelaksanaan patroli kami mendatangi pam Swakarsa, Siskamling dan masyarakat setempat. Kami melakukan komunikasi mengenai keamanan daerah setempat, dan kami juga memberikan pesan-pesan kamtibmas kepada mereka. Masyarakat sendiri mendukung pelaksanaan patroli dan tidak segan melaporkan apabila melihat/mengetahui hal-hal yang mencurigakan di daerahnya (wawancara, 6 Maret 2017).

Masyarakat di wilayah Polres Purbalingga yang mendukung pelaksanaan patroli, merupakan salah satu peluang yang harus di maksimalkan oleh petugas Patroli untuk menekan angka kejahatan yang terjadi.

b. Telah terbentuk kerjasama baik dalam komunikasi maupun koordinasi antara petugas Patroli dengan warga masyarakat, Polsek jajaran yang di *backup* oleh Unit Patroli Polres, serta instansi-instansi pemerintah seperti Pemda, TNI, Dinas Kesehatan dan Dinas Kebakaran. Hal ini didukung dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Kasat Sabhara “Dalam pelaksanaan patroli, kita bekerja sama dengan masyarakat, Instansi samping dan instansi terkait dengan melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mendukung pelaksanaan patroli” (wawancara, 6 Maret 2017). Komunikasi dan Koordinasi dengan masyarakat berguna untuk mendapatkan informasi-informasi apabila terjadi sesuatu yang meresahkan masyarakat. Instansi samping yaitu polsek-polsek wilayah hukum Polres Purbalingga mampu membantu pelaksanaan patroli dan aktif untuk memberikan informasi-informasi penting kepada Polres Purbalingga.

B. *Threat* (Ancaman)

Berkaitan dengan pelaksanaan Patroli yang dilakukan oleh Unit Patroli kendaraan roda empat Polres Purbalingga terdapat beberapa ancaman berdasarkan analisa SWOT yang terakhir yaitu Threats atau ancaman diantaranya:

a. Jumlah penduduk yang sangat padat dan jumlah kendaraan yang semakin meningkat di wilayah hukum Polres Purbalingga

Jumlah penduduk yang sangat padat akan membuat jumlah kendaraan yang semakin meningkat di wilayah hukum Polres Purbalingga. Apabila masih ada masyarakat yang tidak peduli akan lingkungan sekitarnya dan tidak sadar kamtibmas dapat berkakibat terjadinya peningkatan jumlah pencurian bermotor. Hal ini akan menambah beban kerja dari petugas Patroli dalam melakukan kewajibannya untuk menjaga kamtibmas. Pelaksanaan patroli akan semakin mudah apabila masyarakatnya dapat berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan Patroli yang dilaksanakan oleh Unit Patroli kendaraan roda empat khususnya dalam menekan angka kejahatan Curanmor di wilayah Polres Purbalingga.

b. Kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap Kamtibmas

Kesadaran masyarakat terhadap kamtibmas masih tergolong kurang. Pada saat patroli anggota Sabhara masih banyak melihat masyarakat yang meninggalkan rumah tanpa mengunci pagar, parkir sembarangan, dan lain-lain. Hal ini didukuTidak semua masyarakat mengetahui tentang kegunaan dari pelaksanaan Patroli. Masih ada masyarakat yang segan untuk memberikan informasi kepada petugas Patroli, namun sebagian besar dari masyarakat Purbalingga telah mampu untuk bekerjasama dengan petugas Patroli dalam hal saling tukar informasi. Hal ini didukung dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Briпка Kuwat Mujiono, Salah seorang anggota Unit Patroli menyatakan bahwa: “ Pada saat patroli, kita berhenti untuk menyambangi dan mengumpulkan masyarakat. Pada saat berdialog masih ada masyarakat yang segan atau takut memberikan informasi kepada kami bahkan ada yang cuek tidak mau ikut berpartisipasi. Tetapi masih banyak juga masyarakat yang mau dikumpulkan dan ikut berdialog untuk mendukung pelaksanaan patroli” (wawancara, 6 Maret 2017).

Uraian di atas menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Satuan Sabhara khususnya Unit Patroli kendaraan roda empat Polres Purbalingga. Faktor-faktor tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa SWOT.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli roda empat oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga untuk mengatasi curanmor berupa faktor *internal*, yaitu *Strength* (Kekuatan) dengan *Weakness* (Kelemahan), dan *eksternal*, yaitu *Opportunity* (Peluang) dengan *Threat* (Ancaman). Dari faktor-

faktor yang sudah diketahui tersebut kemudian dapat dianalisis menggunakan Teori Analisis SWOT yang dikemukakan oleh Rangkuti, yaitu dengan membuat Matrik TOWS atau SWOT berdasarkan faktor-faktor yang telah diidentifikasi. Dapat ditentukan empat set kemungkinan alternatif strategis dari matrik tersebut . Strategi tersebut dapat dilakukan untuk memperbaiki sekaligus mengoptimalkan patroli roda empat oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga untuk mengatasi curanmor. Adapun matrik Analisis SWOT yang merupakan hasil dari identifikasi faktor-faktor adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Matrik SWOT

Faktor strategi internal	<p>STRENGTH (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Pedoman / Petunjuk Pelaksanaan Teknis pelaksanaan patroli 2. Adanya HTCK yang baik antara Fungsi Sabhara dengan fungsi teknis yang lain 3. Dukungan Anggaran Pelaksanaan Patroli 	<p>WEAKNESS (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan personel 2. Kemampuan dan Kesadaran Anggota 3. Dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM)
Faktor strategi eksternal	<p>STRATEGI SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan patroli dialogis kepada masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam juknis Perkabaharkam No.4 Tahun 2011 tentang Patroli. 2. Dukungan anggaran patroli dapat menunjang pelaksanaan patroli dialogis. 3. Melakukan rapat dengan instansi terkait untuk bersama-sama melakukan pencegahan tindak pidana khususnya Curanmor) 	<p>STRATEGI WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan dukungan masyarakat dengan mengaktifkan kembali siskamling dan pam swakarsa untuk mengatasi kekurangan personel dan keterbatasan BBM Satuan Sabhara. 2. Kerja sama dengan Instansi terkait dengan mengikut sertakannya dalam melakukan pencegahan kamtibmas.
<p>OPPORTUNITY (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Masyarakat 2. Hubungan koordinasi yang baik dengan instansi terkait 	<p>STRATEGI ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan anggota dari fungsi lain untuk ikut dalam kegiatan patroli sehingga menambah personel yang melaksanakan patroli. 2. Bekerja sama dengan 	<p>STRATEGI WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kamtibmas sehingga dapat menjadi polisi bagi dirinya sendiri
<p>THREAT (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah masyarakat yang padat dan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor 2. Kurangnya 		

kesadaran Kamtibmas masyarakat Purbalingga	Fungsi Binmas untuk mengaktifkan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) untuk membangun kerjasama dengan masyarakat 3. Melakukan pembinaan kesadaran hukum terhadap masyarakat melalui sosialisasi tentang keamanan dan ketertiban	
---	--	--

Berdasarkan matrik analisis Swot diatas, dapat ditentukan empat set kemungkinan alternatif strategis. Matrik tersebut memiliki 4 alternatif strategis yaitu:

5. Strategi SO (*Strength and Oppurtunity*)

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar – besarnya (Rangkuti, 2016: 64). Peluang yang dimiliki Satuan Sabhara untuk mencegah terjadinya Curanmor adalah dukungan Masyarakat dan hubungan koordinasi yang baik dengan instansi terkait. Kekuatan yang dimiliki Satuan sabhara akan digunakan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang ada. Kekuatan yang digunakan untuk memanfaatkan peluang tersebut adalah tersedianya pedoman / petunjuk pelaksanaan teknis pelaksanaan patroli dan dukungan anggaran. Perkabaharkam No.4 Tahun 2011 ini menjadi kekuatan bagi Satuan Sabhara Polres Purbalingga untuk melaksanakan patroli dialogis kepada masyarakat. Patroli dialogis berdasarkan Perkabaharkam No.4 Tahun 2011 pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa:

Patroli Dialogis adalah kegiatan Patroli yang dilakukan oleh anggota Polri didalam kegiatannya melakukan kegiatan dialog antara petugas dengan komunitas masyarakat sebagai sasaran Patroli dengan materi dialog yang berupa pesan kamtibmas

Pada saat melaksanakan patroli dialogis petugas dapat melakukan kegiatan dialog dengan komunitas masyarakat. Pelaksanaan patroli dialogis yang dilaksanakan didukung dengan anggaran Satuan Sabhara, karena anggaran Satuan Sabhara berbasis dengan kinerja yang dilakukan. Patroli dialogis dapat digunakan untuk memanfaatkan dukungan masyarakat untuk mencegah curannmor. Petugas dapat memberikan pesan-pesan kamtibmas sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kamtibmas. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kamtibmas dapat mencegah terjadinya curanmor.

Perkabaharkam No.4 Tahun 2011 ini juga menjadi kekuatan bagi Satuan Sabhara Polres Purbalingga untuk melaksanakan koordinasi dengan satuan samping dan instansi terkait. Sebagaimana dijelaskan pada Perkabaharkam No.4 Tahun 2011 pasal 19 ayat 1, “Pimpinan kesatuan/pimpinan lapangan dalam pelaksanaan tugas patroli dapat melakukan koordinasi dengan satuan fungsi kepolisian maupun instansi terkait lainnya”. Satuan Sabhara dapat melakukan koordinasi melalui rapat dengan instansi samping dan instansi terkait untuk bersama-sama melakukan pencegahan tindak pidana khususnya Curanmor. Hasil rapat tersebut akan dilaksanakan oleh Satuan Sabhara, satuan samping dan instansi terkait untuk bersama-sama dan berintegritas untuk melakukan pencegahan kejahatan.

6. Strategi ST (*Strength and Threats*)

Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman (Rangkuti, 2016: 64). Ancaman yang dimiliki Satuan Sabhara jumlah masyarakat yang padat dan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kamtibmas. Kekuatan yang dimiliki Satuan Sabhara akan digunakan untuk mengatasi ancaman yang ada. Kekuatan yang digunakan untuk mengatasi ancaman ini adalah adanya HTCK yang baik antara Satuan Sabhara fungsi teknis yang lain dan dukungan anggaran pelaksanaan patroli.

HTCK yang baik antara Satuan Sabhara dengan fungsi lain dapat mengatasi jumlah masyarakat yang padat dan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor sebagai ancaman. Satuan Sabhara dapat melibatkan fungsi teknis lain untuk melaksanakan patroli. Terlibatnya anggota dari fungsi teknis lain dapat menambah anggota patroli, sehingga ancaman tersebut dapat teratasi.

Satuan Sabhara juga dapat bekerja sama dengan Satuan Binmas untuk mengaktifkan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) untuk membangun kerjasama dengan masyarakat. Kerja sama tersebut juga dapat melakukan pembinaan kesadaran kamtibmas terhadap masyarakat melalui sosialisasi. Kegiatan tersebut dapat mengatasi ancaman yang ada.

7. Strategi WO (*Weakness and Opportunity*).

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada (Rangkuti, 2016: 64). Kelemahan yang dimiliki Satuan Sabhara untuk mencegah terjadinya Curanmor adalah kurangnya personel, kemampuan dan kesadaran anggota, dukungan bahan bakar minyak (BBM).

. Peluang yang dimiliki Satuan sabhara akan digunakan untuk meminimalkan kelemahan yang ada. Peluang yang digunakan untuk meminimalkan kelemahan tersebut adalah dukungan Masyarakat dan hubungan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Satuan Sabhara dapat memanfaatkan dukungan Masyarakat dan hubungan koordinasi yang baik dengan instansi terkait untuk meminimalkan kekurangannya. Dukungan masyarakat, hubungan koordinasi dengan instansi samping dan instansi lain yang dilakukan adalah partisipasi dalam mencegah kejahatan dan sadar akan kamtibmas. Partisipasi masyarakat, instansi samping dan instansi lain dapat membantu Satuan Sabhara untuk mencegah terjadinya tindak pidana khususnya curanmor.

8. Strategi WT (*Weakness and Threats*)

Strategi ini berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman (Rangkuti, 2016: 64). Kegiatan Satuan Sabhara untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman yang ada melalui meningkatkan kesadaran masyarakat akan kamtibmas sehingga dapat menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Apabila kegiatan ini dilakukan maka sedikit kemungkinan terjadinya tindak pidana khususnya curanmor.

Strategi diatas diharapkan dapat memperbaiki dan mengoptimalkan patroli roda empat oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga untuk mengatasi Curanmor.

4.4 Optimalisasi Patroli Roda Empat yang Dilaksanakan oleh Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Purbalingga Guna Mencegah Tindak Pidana Kejahatan Curanmor (Curanmor)

Sub bab ini akan membahas bagaimana optimalisasi Patroli roda empat yang dilakukan oleh Unit Patroli roda empat Satuan Sabhara. Optimalisasi Patroli roda empat yang dilakukan guna menekan angka kejahatan Curanmor, tidak lepas dari kemampuan para petugas Patroli dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan para petugas harus lebih di tingkatkan agar pelaksanaan Patroli lebih optimal. Optimalisasi Patroli dapat dilakukan dengan mengetahui faktor kendala yang dihadapi, dan setelah itu menutupi kekurangan tersebut. Hal ini tentu akan lebih memudahkan Satuan Sabhara dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan Patroli roda empat yang selama ini telah dilaksanakan.

Optimalisasi Patroli yang telah dilakukan oleh Satuan Sabhara belum terlihat hasilnya, karena berdasarkan data dari Satuan Reskrim yang menunjukkan bahwa angka kejahatan Curanmor mengalami kenaikan jumlah kasus. Pelaksanaan patroli yang belum optimal dipengaruhi oleh tidak berjalannya manajemen yang dilakukan oleh pimpinan. Manajemen merupakan faktor pendukung berhasilnya suatu pelaksanaan kegiatan. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur, melibatkan, dan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu secara efektif dan efisien yang telah ditetapkan.

Hal ini didukung dengan pendapat Schemerhorn dalam Silalahi (2011: 6) bahwa, manajemen diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian terhadap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Hal ini didukung juga oleh pendapat George R. Terry (1986: 4) bahwa:

Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.

Untuk menilai optimalisasi Patroli roda empat yang dilakukan oleh Unit Patroli dapat dilihat dari fungsi manajemen yang dilakukan oleh Kanit Turjawali. Teori manajemen Stoner digunakan untuk menganalisis manajemen yang dilakukan oleh Kanit Turjawali.

Menurut Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992: 20), “fungsi-fungsi manajemen adalah perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leading), dan pengendalian (Controlling)”.

a. Perencanaan (planning)

Perencanaan merupakan hal pertama yang harus dilakukan agar semua pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Unit Patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat yang dipimpin oleh Kanit Turjawali telah melaksanakan perencanaan tersebut. Perencanaan yang sudah dilakukan dengan baik meliputi pembuatan jadwal pelaksanaan Patroli, penyiapan sprin, penyiapan kekuatan, penyiapan rute dan penyiapan alat komunikasi. Jadwal disusun agar pada pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih antara Unit Patroli satu dengan Unit Patroli lainnya. Petugas sebelum melaksanakan Patroli dibekali dengan surat perintah tugas sebagai bukti bahwa petugas tersebut telah mendapatkan perintah dari satuannya untuk melaksanakan Patroli.

Penyiapan kekuatan oleh Kanit Turjawali sudah dilaksanakan, namun kekuatan tersebut dinilai masih kurang. Kekurangan personil mengakibatkan hanya 1 unit kendaraan saja yang digunakan. Satu unit kendaraan yang lain tidak digunakan karena kekurangan personil, akibatnya pelaksanaan patroli tidak dapat melalui seluruh rute yang telah ditentukan. Perlu dilakukan penambahan personel untuk dapat memenuhi kebutuhan personil yang diinginkan. Hal ini didukung oleh pendapat Stoner Dalam Bakowatun (1992: 20) bahwa “Organisasi dapat memperoleh serta mengikat sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuannya”.

Tahap persiapan yang belum dilakukan adalah pengecekan kondisi fisik dan mental personel, kelengkapan perorangan, kelengkapan satuan, sarana dan prasarana yang digunakan. Hal tersebut terjadi karena Kanit Turjawali tidak memberikan apel terhadap anggota. Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Kasat Sabhara bahwa:

Pengecekan perorangan dan sarana prasarana terhadap anggota belum optimal dilaksanakan oleh Kanit Turjawali, bahkan ada perlengkapan patroli yang tidak dimiliki oleh satuan Sabhara. Pengecekan kondisi fisik personil secara langsung juga tidak dilaksanakan, karena Kanit juga sering tidak memberikan AAP secara langsung terhadap anggota. AAP hanya dilakukan melalui group Whatsapp (wawancara, 6 Maret 2017).

Pengecekan perorangan dan sarana prasarana perlu dilakukan secara langsung oleh Kanit Turjawali kepada anggota. Pengecekan tersebut berfungsi untuk mengetahui apakah kondisi fisik dan mental personel baik, kelengkapan perorangan yang dibawa, kelengkapan satuan, sarana dan prasarana yang digunakan untuk patroli sudah dibawa atau tidak. Hal ini didukung dengan Perkabaharkam Polri No. 4 Tahun 2011 Tentang Patroli pasal 6 ayat (2) huruf c yang berbunyi:

Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

c. Melakukan pengecekan kondisi fisik dan mental personel, kelengkapan perorangan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk patroli

Penyiapan perorangan dan Sarpras tersebut sangat berpengaruh terhadap perencanaan pelaksanaan patroli. Perencanaan itulah yang akan menetapkan tujuan-tujuan dan penentuan strategi pimpinan untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan merupakan suatu tahapan bagi manajer untuk menentukan pelaksanaan kegiatan dan tujuan organisasi. Rencana yang telah dibuat memberikan sasaran bagi organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai sasaran tersebut (Stoner dalam Bakowatun dan Molan, 1992: 4).

Para petugas sebelum melaksanakan patroli tidak mendapat arahan secara langsung dari Kanit Turjawali. Pelaksanaan AAP patroli tidak diberikan secara langsung oleh Kanit Turjawali Satuan Sabhara Polres Purbalingga melainkan dengan menggunakan media sosial aplikasi grup Whatsapp, sebagaimana yang dikatakan oleh Kanit turjawali:

Untuk pemberian AAP patroli yang dilaksanakan secara rutin, saya jarang memberikan AAP secara langsung kepada anggota. saya jarang memberikan apel kepada anggota sebelum pelaksanaan patroli. Arahan-arahan mengenai pelaksanaan patroli saya berikan hanya melalui aplikasi grup Whatsapp. Namun untuk patroli yang dilaksanakan pada operasi tertentu, AAP saya berikan secara langsung dan saya apalkan anggota (wawancara, 8 Maret 2017).

Anggota patroli sebelum melaksanakan tugas seharusnya diberikan AAP oleh Kanit Turjawali secara langsung melalui kegiatan apel. Hal ini didukung dengan Perkabaharkam Polri No. 4 Tahun 2011 Tentang Patroli pasal 7 yang berbunyi:

Sebelum pelaksanaan tugas patroli, pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan melaksanakan acara arahan pimpinan (AAP) kepada seluruh anggota Polri yang ditugaskan dalam patroli.

Perintah yang diberikan oleh Kanit Turjawali kepada anggota diberikan melalui acara arahan pimpinan. Perintah yang diberikan berguna untuk mengarahkan anggota agar dapat melaksanakan patroli dengan baik. Pelaksanaan yang dilakukan tentunya berdasarkan perencanaan dan pengorganisasian yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Hal ini didukung oleh pendapat Terry dalam Smith (2009: 17), “*Actuating* (memberi dorongan) yaitu kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai”.

Acara arahan pimpinan (AAP) disampaikan Kanit Turjawali melalui Aplikasi Whatsapp meliputi nama-nama anggota yang bertugas melaksanakan patroli, sasaran patroli, dan agar melaporkan kejadian-kejadian menonjol yang ditemukan pada saat melaksanakan patroli. Sebagaimana disampaikan oleh Bripta Kuwat Mujiono, Salah seorang anggota Unit Patroli “ Sebelum pelaksanaan patroli, Kanit memberikan arahan melalui aplikasi Whatsapp. Arahan pimpinan meliputi nama-nama anggota yang melaksanakan patroli, sasaran patroli, dan kepada anggota yang melaksanakan patroli agar melaporkan kejadian-kejadian menonjol yang ditemukan pada saat bertugas” (wawancara, 6 Maret 2017). Hal ini tidak sesuai dengan Perkebarkam Polri No. 4 Tahun 2011 Tentang Patroli pasal 7 ayat a, b, c, dan d yang berbunyi:

Sebelum pelaksanaan tugas patroli, pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan melaksanakan Acara Arahan Pimpinan (AAP) kepada seluruh anggota Polri yang ditugaskan dalam patroli yang ditugaskan dalam patroli dengan menyampaikan :

- a. gambaran/karakteristik daerah sasaran, bentuk-bentuk sasaran/objek yang akan dilakukan patroli;
- b. rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh petugas patroli;
- c. batasan waktu pelaksanaan patroli; dan
- d. larangan dan kewajiban petugas patroli.

a. Objek Sasaran

Kanit Turjawali seharusnya memberikan AAP sesuai dengan juknis yang telah dijelaskan di atas. AAP berguna untuk mengorganisasikan anggota untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat.

Perencanaan yang belum dilaksanakan oleh Kanit Turjawali sebelumnya, diharapkan dapat dibenahi kembali agar perencanaan yang dilakukan menjadi optimal.

b. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian pelaksanaan patroli di pimpin oleh Kanit Turjawali. Pengorganisasian yang dilaksanakan oleh Kanit yaitu membagi personel kedalam 3 regu Unit Patroli. Satu regu terdiri dari 3 orang personel. Tiga regu ini dibagi ke dalam 3 bagian yaitu ada yang bertugas sebagai pelaksana patroli atau piket Patroli, ada yang bertugas sebagai cadangan Patroli dan yang sudah melaksanakan Patroli atau lepas dinas.

Petugas piket yang melaksanakan Patroli, melakukan tugasnya selama 12 jam seperti yang tercantum dalam tabel jadwal pelaksanaan Patroli. Petugas yang menjadi cadangan menunggu selama 12 jam sebelum melaksanakan piket Patroli dan untuk petugas yang telah selesai melaksanakan piket maka dapat beristirahat selama 24 jam namun tetap siaga apabila di butuhkan oleh satuan maupun Polres.

Pelaksanaan patroli roda empat menggunakan mobil merk Sedan Lancer. Mobil merk Sedan Lancer yang dimiliki Unit Patroli berjumlah dua buah, namun pada pelaksanaannya hanya digunakan satu buah. Hal ini terjadi karena terjadi kekurangan personel pada Unit Patroli. Pelaksanaan Patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat ini dilaksanakan setiap hari, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasat Sabhara bahwa:

Untuk pelaksanaan Patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat, ada 2 unit kendaraan Patroli dengan merk Sedan Lancer yang di gelar setiap hari. Namun hanya 1 unit kendaraan saja yang digunakan . Satu unit kendaraan Patroli dilaksanakan oleh 3 orang sesuai dengan unit patroli yang telah disusun. Namun di dalam sprin, patroli dilaksanakan oleh 5 orang untuk menyerap anggaran patroli. Hal ini didasarkan oleh Rencana Pendistribusian Anggaran T.A. 2017 Satuan Sabhara. Karena kekurangan

personil untuk penyerapan anggaran, maka digunakan 2 orang anggota Sabhara dalam unit lain untuk dicantumkan dalam sprin. 2 orang anggota tersebut telah ditentukan oleh Satuan Sabhara dengan anggota-anggota tersebut tidak dilibatkan dalam kegiatan lain agar tidak terjadi duplikasi anggaran (wawancara, 6 Maret 2017).

Kekurangan personil mengakibatkan hanya 1 unit kendaraan saja yang digunakan. Satu unit kendaraan yang lain tidak digunakan karena kekurangan personil, akibatnya pelaksanaan patroli tidak dapat berjalan dengan efektif. Perlu dilakukan penambahan personel untuk dapat memenuhi kebutuhan personil yang diinginkan. Hal ini didukung oleh pendapat Stoner Dalam Bakowatun (1992: 20) bahwa “Organisasi dapat memperoleh serta mengikat sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuannya”.

Pelaksanaan pengorganisasian yang dilakukan oleh Kanit Turjawali dengan keterbatasan anggota yang ada dinilai sudah baik. Kanit Turjawali dapat mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya bahan yang dimiliki organisasi. Sejauh mana efektifnya suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk mengerahkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuannya. Hal ini didukung oleh Stoner dalam Bakowatun dan Molan (1992: 4) bahwa “pengorganisasian (*organization*) berarti para manajer itu mengkoordinir sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi. Pengorganisasian ini dilaksanakan oleh manajer untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan. Organisasi yang semakin terpadu dan terkoordinasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka akan semakin efektiflah organisasi itu (Stoner dalam Bakowatun dan Molan, 1992: 4).

c. Kepemimpinan (*leading*)

Setelah perencanaan dan pengorganisasian telah disusun, langkah berikutnya adalah mengatur gerakannya ke arah sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Fungsi ini dikenal dengan sebutan : kepemimpinan (*leading*), pengarahan (*directing*), pemotivasian (*motivating*), penggerakan (*actuating*), dan lain-lain. Menurut Stoner dalam Bakowatun (1992: 20):

Memimpin (*to lead*) menunjukkan bagaimana para manajer mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya, menggunakan orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu, Dengan menciptakan suasana tepat, mereka membantu bawahannya bekerja sebaik mungkin.

Seorang pemimpin untuk mengarahkan dan mempengaruhi anggotanya dilakukan dengan memberi arahan kepada anggotanya atau memerintah anggotanya. AAP ini merupakan bagian dari pengorganisasian. Hal ini didukung dengan pendapat Terry dalam Smith (2009: 17) bahwa, “*Organizing* (pengorganisasian) yaitu bagaimana manajer membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut, dan menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi”.

Perintah yang diberikan oleh Kanit Turjawali kepada anggotanya mencakup tentang gambaran pelaksanaan yang akan dilakukan anggota ketika melaksanakan patroli. Kegiatan memberikan perintah tersebut dikenal juga dengan istilah AAP (Acara Arahan Pimpinan). Pelaksanaan AAP yang dilakukan oleh Kanit Turjawali Satuan Sabhara Polres Purbalingga dilaksanakan melalui aplikasi Whatsapp. Kanit Turjawali sering kali tidak memberikan APP secara langsung, sehingga anggota tidak sepenuhnya mengerti dengan perintah yang diberikan oleh Kanit. Pelaksanaan patroli oleh anggota akhirnya, hanya berjalan sendiri

sesuai kebiasaan yang dilaksanakan anggota saat melaksanakan patroli. Kanit selaku pimpinan seharusnya memberikan AAP secara langsung melalui pelaksanaan apel.

Pimpinan seharusnya memberikan AAP kepada anggotanya secara langsung agar pimpinan dapat mengetahui secara langsung kesiapan dan pemahaman anggota terhadap pelaksanaan patroli.

Perintah yang diberikan kepada anggota diantaranya adalah memerintahkan anggota mendatangi pos-pos satuan keamanan yang terdapat di lingkungan warga masyarakat (pos kamling), mendatangi pos-pos keamanan di perusahaan, menjelajahi tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan, mengamati/mengawasi/memperhatikan pergerakan warga yang bertindak mencurigakan baik di jalan raya maupun di sekitar pemukiman warga yang di lalui oleh Unit Patroli, berhenti di tempat tertentu kemudian melakukan komunikasi dengan masyarakat tentang kondisi keamanan atau segala sesuatu yang dapat mengancam keamanan (pencarian informasi), melakukan tindakan awal Kepolisian apabila menemukan kasus tertangkap tangan, bencana alam ataupun ketika terjadi kebakaran. Setelah diberikan perintah, pimpinan melakukan pengecekan apakah anggota sudah paham dengan perintah yang diberikan. Apabila anggota sudah paham, maka patroli dapat dilaksanakan dengan baik.

Memberikan AAP secara langsung juga dapat memberikan motivasi kepada anggota. Motivasi tersebut diberikan untuk memberikan semangat kepada anggota dan mempengaruhi anggota agar dapat bekerja secara maksimal. Pelaksanaan yang terjadi Kanit Turjawali sebagai pemimpin tidak memberikan Uraian di atas menunjukkan bahwa pimpinan yang dilaksanakan oleh Kanit Turjawali belum optimal. Kanit Turjawali tidak dapat mengarahkan anggotanya dan mempengaruhi anggotanya dengan baik. Pelaksanaan pengarahan hanya diberikan melalui Whatsapp, tanpa melaksanakan apel dengan anggota.

d. Pengendalian (Controlling)

Pelaksanaan pengendalian dilakukan manajer untuk memastikan bahwa tindakan para anggotanya benar-benar membawa organisasi ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Stoner dalam Bakowatun (1992: 20):

Pengendalian (*controlling*) berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah tujuan. Apabila salah satu bagian dari organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkannya kembali ke tujuan yang benar.

Pengendalian ini dilaksanakan oleh Kanit turjawali dengan cara melihat hasil pelaksanaan Patroli yang telah dilakukan apakah sudah sesuai dengan rute yang ditetapkan atau belum. Setelah itu anggota membuat laporan hasil pelaksanaan Patroli. Kemudian hasil dari pelaksanaan Patroli tersebut dianalisa dan dievaluasi agar dalam pelaksanaan Patroli selanjutnya dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya.

Pelaksanaan pengendalian yang dilakukan Kanit Turjawali belum optimal. Kanit melakukan pengendalian kepada anggota hanya melalui alat komunikasi HT dan Whatsapp. Kanit Turjawali jarang melakukan pengendalian dengan melihat secara langsung pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh anggotanya. Kanit Turjawali seharusnya melakukan pengendalian dengan melihat secara langsung pelaksanaan patroli yang dilakukan anggota Unit Patroli. Pengendalian yang dilakukan secara langsung dapat meyakinkan Kanit Turjawali bahwa pelaksanaan patroli sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Apabila salah satu bagian dari pelaksanaan ada yang salah, maka pimpinan berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkannya kembali ke tujuan yang benar.

Pengendalian yang dilakukan dengan memastikan anggota apakah sudah siap untuk melaksanakan patroli, apakah anggota sudah melewati rute yang telah ditentukan, apakah anggota sudah mendatangi pam swakarsa atau masyarakat, apakah anggota mengalami kesulitan dalam pelaksanaan patroli dll.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan patroli yang dilaksanakan oleh Kanit Turjawali belum dilaksanakan dengan optimal. Pelaksanaan patroli yang dilaksanakan tidak berkembang dan tidak memiliki inovasi-inovasi baru. Optimalisasi pelaksanaan patroli perlu dilakukan untuk menekan angka kejahatan Curanmor. Optimalisasi yang perlu dilaksanakan yaitu :

1. Pelaksanaan manajemen yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam Hal ini Kanit Turjawali agar dioptimalkan. Pelaksanaan patroli harus sesuai dengan Perkabaharkam No. 4 Tahun 2011 tentang Patroli.
2. Satuan Sabhara Lebih mengedepankan Patroli dialogis dan patroli bersinggungan terutama di wilayah kerawanan kejadian Curanmor.
3. Memasang spanduk yang berisi tentang himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas terutama bagi pemilik kendaraan bermotor supaya memasang kunci ganda untuk menghindari Curanmor.
4. Kasat/Kanit Turjawali mengajukan untuk penambahan personel kepada Kapolres dengan alasan agar pelaksanaan Patroli dapat lebih optimal.
5. Mengajukan penambahan anggaran pelaksanaan Patroli agar pelaksanaan Patroli dapat menjangkau tempat-tempat yang lebih jauh dan dapat meningkatkan semangat kerja dari petugas Patroli.
6. Membuat Forum Kemitraan Polisi Masyarakat yang lebih terorganisir serta membangun kerjasama dengan masyarakat untuk mengaktifkan kembali Siskamling yang sudah mulai jarang dilakukan.
7. Pihak kepolisian harus bekerja sama dengan pihak dari deler untuk membuat kunci anti maling serta pengamanan yang lebih sulit di rusak oleh pelaku kejahatan sehingga diharapkan akan mengurangi angka kejahatan Curanmor.
8. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti TNI, Pemda, Pemadam Kebakaran, Tokoh-tokoh masyarakat serta petugas keamanan dari masing-masing desa untuk mempermudah dalam pencarian informasi.

Tujuan dilakukan langkah-langkah di atas adalah untuk membangun kekuatan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal sehingga pelaksanaan patroli dapat lebih optimal karena mendapatkan dukungan tambahan baik dari internal maupun eksternal.

Dukungan dari faktor internal akan menambah jumlah pelaksanaan yang ada di wilayah hukum Polres Purbalingga. Berdasarkan data yang diperoleh, kendaraan roda empat yang di miliki oleh Unit Patroli Satuan Sabhara berjumlah 2 unit kendaraan. Keterbatasan jumlah personel maka kendaraan roda empat yang digunakan hanya 1 unit kendaraan.

Bertambahnya jumlah personel maka secara otomatis bertambah pula unit kendaraan yang digunakan dalam pelaksanaan Patroli. Hal ini juga akan meringankan beban petugas karena pembagian untuk wilayah patroli juga tentu akan berkurang. Pelaksanaan patroli wilayah hukum Polres Purbalingga biasanya dibagi kedalam 1 unit kendaraan roda empat sekarang dibagi ke dalam 2 unit kendaraan roda empat. Lebih baik lagi bila penambahan jumlah personel diimbangi dengan penambahan jumlah sarana kendaraan jadi tidak hanya 2 unit kendaraan saja yang beroperasi namun Patroli ini dapat dilakukan oleh 5 unit kendaraan. Penambahan personil juga dapat mempermudah Unit Patroli untuk penyerapan anggaran. Selama ini personil yang ada hanya 3 orang dalam 1 regu, sedangkan dibutuhkan 5 orang anggota untuk menyerap anggaran dengan maksimal. .

Dukungan dari faktor eksternal juga tidak kalah penting karena keberhasilan pelaksanaan Patroli tidak lepas dari partisipasi masyarakat Purbalingga. Patroli dialogis dan pemasangan spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati akan sangat berpengaruh. Hal ini dikarenakan masyarakat akan mengetahui tentang Modus

Operandi yang dilakukan para pelaku Curanmor sehingga akan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kejadian Curanmor.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan patroli harus segera di tangani oleh Polres Purbalingga agar pelaksanaan Patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat dapat berjalan lebih optimal dari pelaksanaan Patroli sebelumnya. Tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Patroli roda empat, terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta menekan agar kejahatan Curanmor dapat terwujud.

Mewujudkan tujuan tersebut tentunya tidak lepas dari kerjasama semua pihak yang terkait dalam menjaga kamtibmas, diantaranya pihak Kepolisian, satuan pengamanan (Satpam) baik di kampung, maupun di perusahaan serta masyarakat. Pihak-pihak tersebut dapat membantu Satuan Sabhara dalam memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang dapat meresahkan masyarakat. Kerja sama Satuan Sabhara dengan pihak-pihak yang dijelaskan sebelumnya membuat segala sesuatu yang dapat mengancam dapat di cegah oleh pihak Kepolisian khususnya Satuan Sabhara. Satuan Sabhara merupakan ujung tombak Polres dalam melakukan pencegahan kejahatan . Optimalisasi yang dilaksanakan diharapkan dapat mencapai hasil yang terbaik dan paling menguntungkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimal artinya “terbaik; tertinggi; paling menguntungkan” (Sugono,2008: 1021). Hasil terbaik yang diharapkan adalah pelaksanaan patroli roda empat yang dilaksanakan oleh Satuan Sabhara Polres Purbalingga dapat mencegah kejahatan Curanmor.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait masalah “Optimalisasi Patroli Roda Empat Satuan Sabhara dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Purbalingga”, disimpulkan bahwa:

- a. Pelaksanaan patroli roda empat yang dilakukan Satuan Sabhara sangat penting, karena dengan adanya patroli diharapkan mampu menekan angka kejahatan, terutama kejahatan curanmor. Akan tetapi pelaksanaan patroli roda empat yang dilakukan Satuan Sabhara Polres Purbalingga belum sesuai dengan Perkabaharkam No. 4 Tahun 2011 dan manajemen patroli yang diterapkan belum terlaksana dengan baik.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli roda empat Satuan Sabhara Polres Purbalingga yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki adalah tersedianya pedoman kerja dan juklak/juknis pelaksanaan patroli, adanya HTCK yang baik antara fungsi Satuan Sabhara dengan fungsi teknis yang lain, dan dukungan anggaran pelaksanaan patroli. Kelemahan yang dimiliki adalah kekurangan personil, kurangnya kemampuan dan kesadaran anggota dan kurangnya BBM. Faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman. Peluang yang dimiliki adalah dukungan masyarakat dan hubungan koordinasi yang baik dengan instansi samping dan instansi terkait. Ancaman yang dimiliki adalah Jumlah masyarakat yang padat dan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan kurangnya kesadaran masyarakat akan Kamtibmas.
- c. Optimalisasi Patroli roda empat Satuan Sabhara dapat dilaksanakan dengan maksimal apabila menggunakan manajemen yang baik. Optimalisasi patroli roda empat Satuan Sabhara Polres Purbalingga masih belum optimal, mengingat aada beberapa faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan patroli, baik internal maupun eksternal. Untuk itu, faktor yang mempengaruhi tersebut harus segera diatasi, sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan patroli roda empat Satuan Sabhara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di wilayah hukum Polres Purbalingga.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulisan ini mengajukan beberapa saran yang mengacu pada permasalahan penelitian dan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan patroli roda empat yang dilakukan Satuan Sabhara Polres Purbalingga harus dilaksanakan sesuai dengan Perkabaharkam No. 4 Tahun 2011 dan manajemen yang dilakukan oleh pimpinan harus dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan patroli yang dilaksanakan Satuan Sabhara diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana, terutama Curanmor.
- b. Perlu dilakukan pengajuan penambahan jumlah personel, pemenuhan sarana dan prasarana dan meningkatkan kemampuan anggota dengan memberikan pendidikan kejuruan dan pelatihan dalam bidang patroli guna mendukung pelaksanaan operasional Satuan Sabhara dalam tugasnya sebagai pengemban tindakan preventif.
- c. Satuan Sabhara Polres Purbalingga perlu melakukan inovasi-inovasi yang kreatif untuk mengoptimalkan patroli roda empat dalam mencegah terjadinya tindak pidana Curanmor. Inovasi tersebut dapat dilakukan dengan patroli dialogis dan patroli bersinggungan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Baharkam Polri. 2016. *Perkabaharkam No. 4 Tahun 2011 tentang Patroli*. Dalam pdf. Hal. 3-17.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 Ayat (1). 2005. Jakarta: Diperbanyak oleh Sinar Grafika Offset.

Polres Purbalingga. 2015. *Buku Intel Dasar Tahun 2015*.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Susunan organisasi Polres Purbalingga berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Pengesahan Nomenklatur dan Titelatur Susunan Organisasi Polri Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 1503 / X / 2001 tanggal 12 Oktober 2001 tentang Buku Petunjuk Administrasi Struktur, Eselonisasi, dan Penggolongan Jabatan dalam kepangkatan di lingkungan organisasi Polri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2011. Bandung: Diperbanyak oleh Citra Umbara.

BUKU:

- Bakowatun, Wilhelmus W. dan Benyamin Molan. 1992. *Manajemen* Edisi Keempat Jilid 1. Alihbahasa dari *Management* oleh James A.F. Stoner dan R. Edward Freeman, 1992. Jakarta: Intermedia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nur'aini, Fajar. 2016. *Teknik Analisis SWOT*. Yogyakarta: Quadrant.
- Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. 2006. *Pencegahan Kejahatan*. Alihbahasa dari *Crime Prevention: Approaches, Practices and Evaluations Second Edition*. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Rangkuti, Freddy. 2016. *SWOT BALANCED SCORECARD*. Jakarta: Gramedia.
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: P.T Bumi Aksara.
- Akademi Kepolisian. 2016. *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program Sarjana Strata (S-1) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian*. Semarang : Akpol.

SKRIPSI

- Amilian, Danang. 2016. *Optimalisasi Patroli Roda Dua Sabhara Dalam Mencegah Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Jombang*. Skripsi. Semarang : Akademi Kepolisian
- Saputera, Richard. 2016. *Upaya Unit Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Wilayah Hukum Polres Mojokerto Kota*. Skripsi. Semarang : Akademi Kepolisian.
- Prawira, Tonny. 2015. *Optimalisasi Patroli Sabhara Roda Dua Dalam Mengurangi Tingginya Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Hukum Polsek Dau*. Skripsi. Semarang : Akademi Kepolisian.